

SKRIPSI

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Menyelesaikan Program
Sarjana (SI) Pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi
Bidang Studi Manajemen*



OLEH :

YULIA DWITA SARI
NPM: 165210182

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN S1
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2020**

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA

YULIA DWITA SARI

ABSTRAK

Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah pada bank umum syariah didalam penelitian ini, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal sendiri terdiri dari CAR dan FDR sedangkan faktor eksternal yakni INFLASI dan SBIS. Dalam hal ini dapat dihitung dengan menggunakan Non Performing Financing (NPF) didalam bank syariah. Dimana jika semakin rendah tingkat Pembiayaan Bermasalah nya maka semakin baik pula kondisi bank tersebut dikarenakan tingkat pembiayaan bermasalah atau kredit macet semakin rendah. Penelitian ini bertujuan guna mengetahui bagaimana pengaruh Inflasi, sertifikat bank Indonesia Syariah (SBIS), Finance to Deposit Ratio (FDR), Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap pembiayaan bermasalah pada bank umum syariah di Indonesia periode 2015-2018. Sedangkan populasi sampel yakni 10 bank umum syariah yang terdaftar di bank Indonesia yakni di Otoritas Jasa Keuangan, dengan menggunakan metode purposive sampling. Dan guna menjelaskan pengaruh variabel-variable ini data yang diperoleh dalam penelitian ini digunakan analisis dengan model regresi linier berganda. Berdasarkan hasil uji t penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Capital Adequacy Ratio (CAR) sedangkan Finance Deposit Ratio berpengaruh tidak signifikan. Sedangkan variabel Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan Inflasi tidak berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah. Namun secara Simultan keempat variabel ini berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah.

Kata kunci: Inflasi, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Capital Adequacy Ratio (CAR), Finance to Deposite Ratio (FDR) dan Non Performing Financing (NPF).

ANALYSIS OF THE FACTORS AFFECTING PROBLEM FINANCING AT ISLAMIC COMMERCIAL BANKS IN INDONESIA

YULIA DWITA SAR

ABSTRACT

When bank distributes its of financing the bank will always face credit risk, credit risk arise if the bank could not get back from the principal of the loan installment that it provide. In the the this case the level of problem loans can be demonstrated by the ratio on Non Performing Financing (NPF) in the Islamic banks. The lower the NPF ratio the better the condition of the bank because the level of the problematic financing is low. This study aimed to find out how the effect of Inflation, Indonesia Sharia Bank Certificate (SBIS), Capital Adequacy Ratio (CAR) and Finance Deposit Ratio (FDR) against Non Performing Financing (NPF) on Islamic Banks in registered in Indonesia banks by taking four samples of Islamic banks. The sampling method is the using purposive sampling method. To explain the influence of these variables the data obtained in this study were analyzed by using multiple linear regression model. The result of by t test showed that the variables Capital Adequacy Ratio (CAR) and Financing Deposit Ratio effect on Non Performing Financing (NPF) while variable which does not effect the NPF is Inflation and SBIS. Four variables influence simultaneously against Non Performing Financing (NPF).

Keywords: Inflation, Indonesia Sharia Bank Certificate (SBIS), Capital Adequacy Ratio (CAR) and Finance Deposit Ratio (FDR) and Non Performing Financing (NPF).

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah Peneliti hadiahkan atas kehadiran Allah SWT karena telah dapat diberikan rahmat olehnya. Sehingga Skripsi yang berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah pada Bank Umum Syariah di Indonesia” dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah diharapkan. Dan selanjutnya tak lupa shalawat beserta salam diucapkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW dimana berkat karunianya dapat membawa perubahan dari alam yang penuh kegelapan sampai pada terang benderang hingga membawa kebahagiaan.

Didalam proses penulisan skripsi ini tak lupa penulis dibantu oleh berbagai pihak, oleh karenanya pada kesempatan yang baik ini penulis ucapkan banyak terima kasih tak terhingga kepada:

1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ketua Program Studi Manajemen Universitas Islam Riau dimana telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk dapat menjalani pendidikan di Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen.
2. Dosen Pembimbing. Bapak Dr. Hamdi Agustin, SE., MM yang telah bersedia memberikan waktunya untuk penulis serta membimbing penulis dengan sangat sabar mulai dari awal hingga akhir pembuatan skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Dosen Penguji, Bapak Azmansyah, SE., M. Econ, dan Ibu yang telah memberikan banyak nasehat dan juga kritikan yang bermanfaat dalam penulisan skripsi ini.

4. Orang tua, abang, adik-adik tercinta yang tidak pernah lelah dalam memberikan semangat beserta dukungan baik itu moril maupun materi kepada penulis.
5. Ibu beserta Bapak dosen yang selama ini telah memberikan ilmunya, sehingga penulis dapat mencapai tahap pembuatan skripsi.
6. Staf administrasi dan pustakawan yang tak lupa dalam proses pengurusan administrasi penulis selama di kampus.
7. Teman-teman Rustika Budiyantri, Isnawati, Upi Rochayanihasana, Tari Rahmawati, Suhartini, Feni Mayulanda, Sriwahyuni, Ratna Yuliana, Regi Chirly, teman-teman seperbimbingan dan juga teman-teman seangkatan khususnya kelas C, yang juga telah memberikan banyak bantuan, dukungan, semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa banyak terdapat kesalahan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu penulis berharap dapat diberikan saran dan juga kritikan yang membangun daei semua pihak demi perbaikan penulis dimasa yang akan datang. Akhir kata semoga apa yang penulis susun didalam skripsi ini dapat memberikan manfaat serta inspirasi bagi dunia pendidikan. Amin.

Pekanbaru, Maret 2020

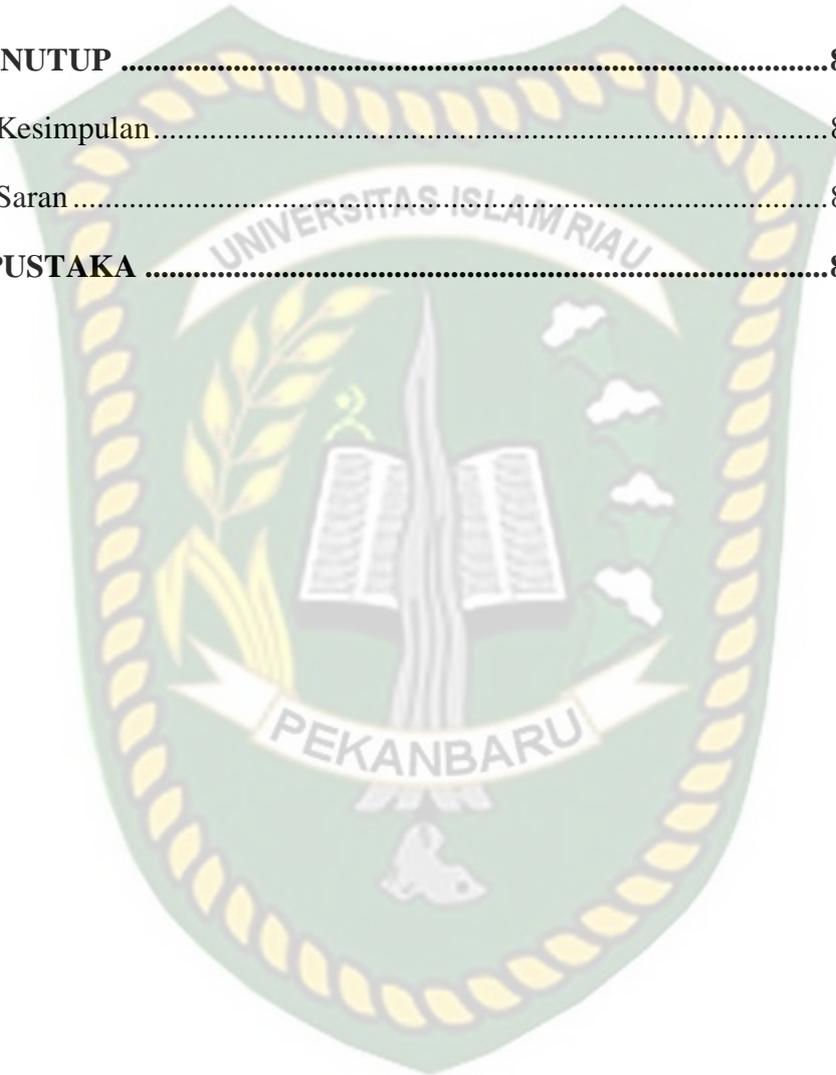
Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian	8
1.4 Sistematika Penulisan	19
BAB II TELAAH PUSTAKA.....	11
2.1 Pengertian Bank Umum Syariah.....	11
2.2 Fungsi Bank	12
2.3 Jenis-jenis Bank	14
2.4 Pengertian Bank Umum Syariah dan Perkembanganya	16
2.4.1 Produk Perbankan Syariah	20
2.5 Pengertian Non Performing Financing	21
2.6 Penelitian Terdahulu	24
2.7 Kerangka Pemikiran	26
2.8 Hipotesis	26

BAB III METODE PENELITIAN.....	27
3.1 Lokasi/Objek Penelitian.....	27
3.2 Operasional Variabel	27
3.3 Populasi dan Sampel.....	30
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	31
3.5 Teknik Pengumpulan Data	32
3.6 Teknik Analisis Data	32
BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	40
4.1 Sejarah Bank Syariah.....	40
4.2 Gambaran Umum Bank Syariah.....	41
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
5.1 Analisis Deskriptif Data	50
5.1.1 Analisis Non Performing Financing.....	50
5.1.2 Analisis Finance Deposite Ratio	54
5.1.3 Analisis Capital Adequacy Ratio	57
5.1.4 Analisis Inflasi	61
5.1.5 Analisis Sertifikat Bank Indonesia Syariah.....	63
5.1.6 Pemilihan Model Regresi Data Panel	65
5.1.7 Hasil Uji Chow.....	67
5.1.8 Hasil Uji Hausman	67
5.2 Hasil Pengujian Asumsi Klasik	68
5.2.1 Uji Normalitas.....	68
5.2.2 Uji Multikolinearitas	69
5.2.3 Uji Heteroskadasitas.....	70
5.2.4 Uji Autokorelasi	71
5.3 Pengujian Hipotesis Dengan Analisis Regresi Data Panel.....	72
5.3.1 Uji T	72
5.3.2 Uji F	75
5.3.3 Koefisien Determinan	76

5.4 Pembahasan	77
5.4.1 Pengaruh Inflasi Terhadap NPF	77
5.4.2 Pengaruh FDR Terhadap NPF	77
5.4.3 Pengaruh CAR Terhadap NPF	78
5.4.4 Pengaruh SBIS Terhadap NPF	79
BAB VI PENUTUP	80
6.1 Kesimpulan	80
6.2 Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	82



DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Komposisi Pembiayaan dan NPF pada Bank Umum Syariah	5
Tabel 1.2 Kredit Macet Non Performing Financing.....	7
Tabel 3.1 Operasional Variabel	27
Tabel 3.2 Bank Umum Syariah yang Terdaftar di OJK.....	31
Tabel 5.1 Sampel Penelitian	49
Tabel 5.2 Data NPF pada Sektor Perbankan	51
Tabel 5.3 Data FDR pada Sektor Perbankan	55
Tabel 5.4 Data CAR pada Sektor Perbankan	58
Table 5.5 Data Inflasi pada Sektor Perbankan	62
Tabel 5.6 Data SBIS pada Sektor Perbankan	64
Tabel 5.7 Common Effect Model	66
Tabel 5.8 Fix Effect Model.....	66
Tabel 5.9 Random Effect Model	66
Tabel 5.10 Hasil Uji Chow	67
Tabel 5.11 Hasil Uji Hausman	67
Tabel 5.12 Hasil Uji Normalitas.....	69
Table 5.13 Hasil Uji Multikollinieritas.....	70
Tabel 5.14 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	70
Tabel 5.15 Hasil Uji Autokorelasi.....	72
Tabel 5.16 Hasil Uji T	73
Tabel 5.17 Hasil Uji F	75

5.18 Koefisien Determinasi76



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
5.1 Grafik Data NPF pada Perbankan Syariah	53
5.2 Grafik Data FDR pada Perbankan Syariah.....	56
5.3 Grafik Data CAR pada Perbankan Syariah	60
5.4 Grafik Data Inflasi pada Perbankan Syariah	63
5.5 Grafik Data SBIS pada Perbankan Syariah	65



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan pada bank umum syariah di Indonesia, yakni ada dua faktor. Faktor internal dan faktor eksternal, dimana kedua faktor ini memiliki dampak yang berbeda-beda bagi bank itu sendiri. Faktor internal sendiri merupakan faktor yang terdapat pada tubuh bank itu sendiri, seperti faktor manajerial dan operasional dimana setiap prosedur baik manajerial maupun operasional pada bank diatur sesuai dengan ketentuan yang ada pada prosedural bank. Sedangkan pada faktor eksternal yakni faktor yang dimana faktor yang tidak ada atau tidak terdapat pada bagian tubuh bank itu sendiri atau tidak dapat dikendalikan oleh bank itu sendiri. Sovia, Sasa Elida (2016).

Faktor-faktor ini sendiri memiliki dampak bagi perkembangan bank,terlebih lagi bagi bank umum syariah. Karena didalam penelitian ini mengambil objek pada bank umum syariah. Dimana faktor internal memiliki dampak yang begitu nyata bagi perkembangan khususnya didalam menyediakan cadangan dana bagi para nasabah. Karena apabila terjadi resiko didalam pembiayaan akibatnya bank harus mampu menyediakan cadangan dana yang lebih besar guna mengurangi resiko. Resiko pembiayaan ini berdampak baik bagi proses manajerial maupun operasional yang seharusnya dapat berjalan dengan semestinya menjadi

tidak baik karena adanya resiko pembiayaan yang tidak terkendali oleh bank itu sendiri. Didalam faktor internal sendiri terdapat variabel seperti FDR dan CAR dan yang berpengaruh terhadap NPF. Sovia, Sasa elida (2016).

Dampak dari faktor eksternal itu sendiri merupakan ancaman nyata bagi bank, seperti bencana alam. Bencana alam dapat menyebabkan jalannya kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat terhambat dan begitu sebaliknya masyarakat yang ingin memperoleh biaya akan terhambat prosesnya. Perubahan teknologi yang sangat cepat dan tidak terkenadali dapat menyebpkan resiko yang berbahaya bagi kelangsungan prosedrudal dalam kegiatan perbaankan baik penyaluran maupun penghimpunan. Kebijakan ekonomi yang berubah-ubah dari pemerintah juga memiliki dampak yang sangat signifikan bagi bank, dimana kebijakan ekonomi yang tidak menguntungkan seperti manaikan suku bunga dll dapat meyebabkan system pada bank tidak dapat berjalan dengan semestinya. Didalam faktor variabel yakni INFLASI dan SBIS yang berpengaruh terhadap NPF. Sonia, Sasa Elida (2016).

Dan rasio yang digunakan ialah *Non Perfoerming Financing* (NPF). Dimana bank yang memiliki tingkat NPF yang tinggi menjadi lebih berisiko mengalami kerugian dalam pemberian kredit. NPF berpengaruh terbalik terhadap probabilitas yang dapat dilihat dari kualitas kredit, apabila NPF tinggi maka probabilitasnya menjadi rendah.

NPF merupakan indikasi yang digunakan didalam penelitian ini, dimana agar dapat digunakan dalam proses permasalahan kredit macaet khususnya pada bank umum syariah karena penalitian ini menggunakan bank umum syariah sebagai objeknya.

Non Performing Financing (NPF) ialah indikator pembiayaan bermasalah yang perlu diperhatikan karena sifatnya yang fluktuatif dan tidak pasti. NPF ialah instrument penilaian kinerja sebuah bank syariah yang menjadi interprestasi penilaian pada aktiva produktif. Khususnya dalam penilaian pembiayaan bermasalah.

Indikasi pembiayaan bermasalah misal perilaku rekening (*accaount attitudes*), perilaku kegiatan bisnis (*business activities attitude*), perilaku nasabah (*customer attitudes*) dan perilaku makro ekonomi (*economic marco attitudes*). Sedangkan factor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah dapat disebabkan oleh tiga unsur yakni:

1. Pihak bank itu sendiri (kreditur).
2. Dari pihak debitur
3. Diluar pihak kreditur dan debitur tersebut.

Dan dari faktor-faktor tersebutlah kinerja bank disebut sebagai mikro ekonomi. Vivin, Yenini Annor dan Budi Wahono (2016). NPF sendiri memiliki fungsi yang sangat dibutuhkan oleh pihak bank atau pihak investor, karena dapat dijadikan sebagai cerminan resiko pembiayaan.

Pembiayaan adalah salah satu bentuk penyaluran dana yang diberikan bank syariah kepada masyarakat yang membutuhkan. Bank harus memperhatikan berbagai faktor dan aspek apa saja saja harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan terhadap masalah pembiayaan atau penyaluran dana pada masyarakat. Mokhtar et al., (2005).

Risiko kredit ialah akibat dari kegagalan debitur dan atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Bank yang kinerjanya bergantung pada kinerja lawan (*counterparty*), penerbit (*issuer*), atau kinerja pinjaman dana (*borrower*). Risiko kredit juga dapat diakibatkan oleh terkonsentrasinya penyediaan dana pada debitur, wilayah geografis, produk, jenis pembiayaan atau lapangan usaha tertentu. Penyebab pembiayaan bermasalah sendiri dapat terkait dengan karakteristik system dibank Syariah yang menunjukkan pengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan bermasalah

Tabel 1.1

komposisi pembiayaan dan NPF Bank Umum Syariah

(nominal dalam Million Rp)

Akad	2015	2016	2017	2018
<i>Mudharabah</i>	7.979	7.577	6.584	6.014
<i>Musyarakah</i>	2.748	2.376	3.335	3.165
<i>Murabahah</i>	4.397	5.173	5.378	4.857
<i>Qardh</i>	3.308	3.883	5.476	6.052
<i>Istisna</i>	120	25	18	185
<i>Salam</i>	0	0	0	0
<i>Ijarah</i>	1.561	1.882	2.788	2.832
Jumlah	19.813	20.916	23.579	23.105

Sumber: OJK dan SPS BI 2018

Dari data tabel diatas perbankan umum syariah yang dipublikasi oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, terlihat bahwa pembiayaan Mudharabah mengalami penurunan pada tiga tahun berturut-turut yakni pada pada tahun 2016, 2017, 2018. Dan pembiayaan mudharabah tersebut hanya tinggi pada tahun 2015 yakni senilai 7.979 (nominal dalam miliar Rp). Pada pembiayaan musyarakah dari tahun 2015-2018 mengalami peningkatan yang signifikan dan hanya mengalami penuruanan pada tahun 2016 yakni senilai 2.376 (nominal dalam miliar Rp). Pada pembiayaan murabahah mengalami peningkatan dari tahun

2015-2017 dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2018 yakni senilai 4.857 (nominal dalam miliar Rp). Berbeda dengan pembiayaan Qardh yang dengan konsisten terus mengalami peningkatan yang baik dari tahun ketahunnya yakni dari tahun 2015-2018. Pada pembiayaan istisna mengalami penuruan yang cukup signifikan yakni pada tahun 2016 dan tahun 2017. Sedangkan pada pembiayaan salam tidak terdapat pembiayaan. Pada pembiayaan ijarah mengalami peningkatan yang cukup baik dari tahun 2015-2018. Jadi dapat disimpulkan bahwa total pembiayaan dari seluruh akad ialah terjadi pada tahun 2017 yakni 23.579 (nominal dalam miliar Rp). Terlihat bahwa pembiayaan mudharabah mendominasi pembiayaan yang disalurkan oleh bank umum syariah. Dan ini sangat baik dimana dapat mendorong dan mempercepat kemajuan ekonomi suatu negara melalui sector rill melalui pembiayaan berbasis bagi hasil.

Tabel 1.2
Kredit Macet, Non Performing Financing
(nominal dalam persentase %)

Tahun	Non Performing Financing (nominal dalam %)
2015	4,84%
2016	4,42%
2017	4,76%
2018	4,30%

Sumber: OJK dan SPS 2018

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa NPF pada tahun 2015 yakni sebesar 4,84% dan mengalami penurunan pada tahun 2016 yakni sebesar 4,42%. Pada tahun 2017 kembali mengalami kenaikan sebesar 4,76% dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2018 yakni sebesar 4,30%. Non performing financing tertinggi terjadi pada tahun 2015 yakni sebesar 4,84% sedangkan NPF terendah yakni pada tahun 2018 sebesar 4,30%.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan diatas, maka dapatlah di formalisasikan masalah penelitian ini sebagai berikut:

“ faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia”.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia periode tahun 2015-2018.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti. Untuk mengetahui dan mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dan sebagai alat mencari pengalaman belajar dalam penelitian.
2. Bagi Bank. Agar dapat memperbaiki system pada perbankan bank syariah yang tidak sesuai dengan ketentuan dan tentunya system yang merugikan dan harus sesuai dengan ketentuan syariah islam.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya. Dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya guna pengembangan ilmu pengetahuan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ialah urutan penyajian dari masing-masing bab secara singkat dan jelas diharapkan mempermudah dalam memahami laporan penelitian. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I :PENDAHULUAN

Bab ini penulis akan menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II :TELAAH PUSTAKA

Bab ini penulis akan menguraikan pengertian bank umum syariah, Non Performing Financing, faktor-faktor penyebab terjadinya permasalahan NPF rasio keuangan dan yang lainnya yang relevan dan sesuai dengan penelitian ini, serta diakhiri dengan rumusan hipotesis.

BAB III :METODE PENELITIAN

Bab ini akan menguraikan metode penelitian, tempat penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, operasional variabel, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini menjelaskan gambaran umum bank-bank umum syariah di Indonesia merupakan sampel dalam penelitian ini.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas hasil dari pengolahan data yang telah didapatkan dan kemudian ditarik kesimpulannya.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan didapatkan dari pembahasan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1 Pengertian Bank umum syariah

Bank umum syariah adalah instrument system perbankan yang memiliki fungsi sama bank konvensional yakni sebagai wadah pembayaran, lembaga perantara keuangan. Ada perbedaan filosofi system operasional antara bank syariah dengan bank konvensional yaitu adanya internalisasi nilai-nilai dan hukum islam dalam perbankan syariah.

Menurut Meskuisiwati (2007), bank adalah bagan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan kembali di distribusikan kepada masyarakat. Menurut Febryani dan Zulfadin (2003), bank adalah lembaga yang memiliki wewenang sebagai alat atau lembaga yang melakukan intermediasi antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak-pihak yang memerlukan dana. Dan dalam menjalankan tugasnya sebagai alat perbankan bank wajib menjaga kepercayaan masyarakat dan bank wajib menjalankan fungsinya dengan baik dan wajib meningkatkan kinerjanya agar tujuan dari semua pihak dapat tercapai.

Menurut Stuart Verryin dalam Hasibuan (2006:2) bank ialah badan usaha yang sifatnya memuaskan keperluan orang

lain dengan memberikan kredit yang berbentuk uang dan diterimanya dari orang lain. Jadi bank telah melakukan operasi aktif dan pasif, yaitu mengumpulkan dana dari masyarakat kelebihan dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Dalam undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bank bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat.

Keuntungan utama bisnis perbankan yang berdasarkan prinsip konvensional diperoleh dari selisih bunga simpanan yang diberikan kepada penyimpan dengan bunga pinjaman atau kredit yang disalurkan. (Kasmir, 2008:2012).

2.2 Fungsi Bank

Fungsi utama bank menurut Sigit dan Totok Budianto (2006: 9) yakni menghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkannya kembali kepada masyarakat guna berbagai tujuan sebagai *financial intermediacy*.

Berikut adalah fungsi dari bank diantaranya:

- a) *Agent of trust*. Dasar utama dari perbankan adalah trust yaitu kepercayaan, baik itu dalam hal menghimpun maupun dalam hal menyalurkan kembali. Masyarakat sendiri akan mau dan percaya menitipkan dananya apabila dilandasi adanya

kepercayaan. Masyarakat tersebut percaya dananya tidak akan digelapkan oleh bank, uangnya tidak akan disalahgunakan oleh pihak bank, uangnya akan dikelola dengan baik oleh bank, bank tidak akan bangkrut. Begitu pula dengan pihak bank, mereka akan mau menyalurkan dananya kepada masyarakat karena dilandasi dengan kepercayaan dan debitur tidak akan menyalahgunakan kepercayaan dari bank dan dapat mengelola dana dengan baik, debitur juga dapat mempunyai kemampuan dalam membayar pada saat jatuh tempo.

b) *Agent of development.* Sektor dalam kegiatan perekonomian masyarakat adalah sector moneter dan sektor rill, kedua hal ini tidak dapat dipisahkan. Keduanya disinyalir dapat saling berinteraksi dan saling mempengaruhi satu dan lainnya. Sektor rill tidak akan dapat berinteraksi dengan baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik pula. Tugas bank sebagai penghimpun dan penyalir dana sangat diperlukan demi kelancaran kegiatan perekonomian di sektor rill. Karena dengan kegiatan tersebut memungkinkan masyarakat mengingat semua kegiatan baik itu investasi, distribusi,

konsumsi, selalu berkaitan dengan penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi, distribusi, konsumsi ini tidak lain merupakan kegiatan pembangunan perekonomian masyarakat.

- c) *Agent of services*. Bank juga memiliki fungsi memberikan penawaran jasa-jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa-jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan perekonomian masyarakat umum.

2.3 Jenis-Jenis Bank

Jenis-jenis bank menurut Kasmir (2013: 32-37):

- 1) Dilihat dari segi fungsinya.

Menurut Undang-undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967 jenis perbankan menurut fungsinya terdiri dari:

- a) Bank Umum
- b) Bank Pembangunan
- c) Bank Tabungan
- d) Bank Pasar
- e) Bank Desa
- f) Lumbung Pegawai
- g) Bank Pegawai
- h) Dan bank lainnya

- 2) Dilihat dari segi kepemilikannya

Yaitu siapa saja yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank tersebut. Jenis-jenis bank dilihat dari segi kepemilikannya dapat dilihat dari segi:

- a) Bank milik pemerintah. Bank ini merupakan bank yang akte pendiriannya dan modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga keuntungannya dimiliki oleh pemerintah. Contohnya bank BNI, BRI, BTN
- b) Bank milik swasta nasional, merupakan bank yang seluruh atau bagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional dan akte pendiriannya dimiliki oleh swasta, begitu pula dengan pembagian keuntungannya. Contohnya bank muamalat, bank central asia, bank bumi putra, bank danamon, bank duta, bank lippo, bank universal, bank internasional Indonesia.
- c) Bank milik koperasi Indonesia ialah bank yang saham-saham kepemilikannya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contohnya bank umum koperasi Indonesia.
- d) Bank milik asing, merupakan cabang dari bank yang ada diluar negeri, baik swasta atau pemerintah asing serta kepemilikannya dimiliki oleh pihak luar negeri. Contohnya

adalah bank ABN AMRO bank, Bank of Tokyo, Bangkok Bank dll.

- e) Bank milik campuran, merupakan bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional.

Jenis-jenis bank dilihat secara umum dalam menentukan harga baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam dua yakni:

- a) Bank yang berdasarkan prinsip syariah. Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan syariah adalah sebagai berikut:

- Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah).
- Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah).
- Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah).
- Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah).

2.4 Pengertian Bank Umum Syariah dan perkembangannya

Menurut Hasan (2014:103), Konsep syariah diyakini dapat menjadi system efektif dan tidak mudah terpengaruh krisis

ekonomi. Tahun 1998 terjadi krisis ekonomi Indonesia yang telah menenggelamkan bank konvensional dan banyak likuiditas karena kegagalan sistem bungannya. Sementara bank menetapkan sistem syariah dapat bertahan, dan ini membuat bank konvensional untuk mendirikan bank yang memakai sistem syariah pada akhir tahun 1999. Sistem syariah juga memiliki beberapa permasalahan masalah datang dari internal perbankan syariah itu sendiri. Bank syariah sebagai salah satu bagian sistem perbankan juga memiliki fungsi sama dengan bank konvensional yaitu bertindak sebagai administrator sistem pembayaran dan sebagai lembaga prantara keuangan.

Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dalam kerangka dual banking system, sistem perbankan ganda kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API) guna menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Sistem syariah dan konvensional secara bersinergi mendukung mobilisasi dana masyarakat lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor ekonomi nasional. karakteristik dasar dari sistem syariah antara lain melarang badan transaksi yang dilandasi pada motif spekulasi yang membuat bank syariah identic sebagai wadah pembiayaan memiliki keterkaitan erat dengan sector rill dan hal inilah yang menjadi kompetitif bagi bank syariah.

Industri perbankan sendiri menjadi salah satu industri yang memiliki persaingan cukup ketat, selain karena banyaknya jumlah bank yang beredar juga karena makin selektifnya masyarakat dalam menentukan pilihannya terhadap bank-bank yang beroperasi. Jumlah bank yang beroperasi di Indonesia yaitu kisaran 120 bank yang terdiri dari 4 bank persero, 36 bank BUSN Devisa, 26 BPD, 14 bank campuran, dan 10 Bank asing. Persaingan ketat ditunjukkan oleh bank perseroan atau bank pemerintah dan bank umum swasta nasional.

Perbankan syariah atau perbankan islam adalah system perbankan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah islam. Tingkat keuntungan bank syariah sesuai dengan nilai-nilai syariah juga dan wajib diketahui oleh pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Agar apabila ada keuntungan maupun kerugian pihak-pihak yang terlibat dapat sama-sama menanggungnya. Haram bagi bank syariah melakukan transaksi-transaksi yang mengandung unsur maisir, gharar, dan riba. Prinsip-prinsip yang dilarang diantaranya yaitu:

1. Perniagaan barang-barang haram.
2. Bunga
3. Perjudian spekulasi disengaja.
4. Abstrak manifulatif.

Konsep ekonomi syariah memiliki system efektif serta tidak terpengaruh gejolak krisis ekonomi. Tahun 1998 terjadi krisis ekonomi di Indonesia menenggelamkan bank-bank konvensional di Indonesia, sementara bank yang menerapkan system syariah mampu dapat bertahan. Dan hal tersebut mendorong pihak bank konvensional untuk mendirikan bank yang memakai system yang sesuai dengan syariah islam hal ini terjadi di tahun 1999. Dan perbankan syariah menjadi dikenal besar go internasional System syariah menawarkan keadilan, transparansi, akuntabilitas dan saling percaya diantara para pelaku ekonomi. Dimana system ekonomi dunia didominasi oleh para pemilik modal dan para kaum kapitalis yang memiliki pengaruh kuat bagi perekonomian dunia dan akhirnya menimbulkan korban sehingga bank syariah ini diharapkan memberikan solusi atas keadaan tersebut (Ningsih, 2012).

Dalam perjalanannya bank umum syariah dinilai baik ternyata masih memiliki banyak permasalahan. Yakni dari internal perbankan syariah sendiri. Dimana system syariah baik tidak diimbangi pengetahuan pemahaman yang baik karyawan bank syariah terhadap syariah dan ekonomi islam. (Hasan, 2014:103).

2.4.1 Produk Perbankan Syariah

- Titipan simpanan Al-wadiah (jasa penitipan) ialah jasa penitipan dana sewaktu-waktu bias diambil. System ini, bank tidak wajib dan diperbolehkan memberikan bonus kepada nasabah.
- Bagi hasil Al-Musyarakah (joint Venture) dimana keuntungannya dibagi dalam rasio yang disepakati sementara kerugian dibagi berdasarkan rasio ekuitas yang dimiliki masing-masing pihak.
- Jual beli Ba'i al-murabahah ialah penyimpanan dana jual beli bank akan membelikan barang yang dibutuhkan oleh pengguna jasa kemudian menjualnya ke pengguna jasa dengan harga yang dinaikan sesuai dengan keuntungan yang ditetapkan bank dan pengguna jasa dapat mengangsur barang tersebut. Ba'i salam yaitu bank akan membelikan barang yang dibutuhkan dikemudian hari pembayaran dilakukan dimuka. Barang yang dibeli harus diukur, ditimbang secara jelas dan spesifik. Ba'i Al-Istishna, merupakan bentuk As-salam khusus dimana harga barang bias dibayar saat kontrak, dibayar secara angsuran, atau dibayar dikemudian hari.

- Sewa, Al-ijarah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti pengalihan milik produk itu sendiri.
- Jasa Al-wakalah ialah akad transaksi perbakan syariah yang akad perwakilan sesuai prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh agama islam. Al-wakalah memberikan jaminan diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Al-wakalah adalah akad perpindahan dalam praktiknya memindahkan utang dari tanggungan orang berutang menjadi tanggungan orang berkewajiban membayar hutang.

2.5 Non Performing Financing (NPF)

Non Performing Financing (NPF) pembiayaan bermasalah sifatnya fluktuatif dan tidak pasti sehingga pentingnya perhatian khusus. Salah satu instrument penilaian kinerja sebuah bank syariah yang menjadi interprestasi penilaian pada aktiva produktif. Khususnya dalam pembiayaan bermasalah.

Indikasi pembiayaan bermasalah perilaku rekening (*accaccount attitudes*), perilaku kegiatan bisnis (*business activities attitude*), perilaku nasabah (*customer attitudes*) dan perilaku makro ekonomi (*economic marco attitudes*). Sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah disebabkan oleh tiga unsur yakni:

1. Pihak bank sendiri (kreditur).
2. Dari debitur.
3. Diluar kreditur dan debitur tersebut.

Dan faktor tersebutlah kinerja bank disebut sebagai mikro ekonomi. Mahmoedin (2002).

Pembiayaan adalah bentuk penyaluran dana yang diberikan bank syariah kepada masyarakat yang butuh guna dikumpulkan oleh bank syariah dan masyarakat yang memiliki dana surplus. Bank harus melihat berbagai faktor dan aspek apa saja harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan terhadap masalah pembiayaan atau penyaluran dana pada masyarakat. Mokhtar et al., (2005).

Non Performing Financing (NPF) menjelaskan besarnya pembiayaan bermasalah, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Non Performing Financing} = \frac{\text{Pembiayaan (k.l.d.m)}}{\text{Pembiayaan}}$$

Non performing financing (NPF) ialah rasio anatar pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Dimana hal ini didasarkan kriteria ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu termasuk NPF ialah pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet.

Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan pada bank umum syariah di Indonesia, yakni ada dua faktor. Faktor internal dan faktor eksternal, dimana kedua faktor ini memiliki dampak yang berbeda-beda bagi bank itu sendiri. Faktor internal sendiri merupakan faktor yang terdapat pada tubuh bank itu sendiri, seperti faktor manajerial dan operasional dimana setiap prosedur baik manajerial maupun operasional pada bank diatur sesuai dengan ketentuan yang ada pada prosedural bank. Sedangkan pada faktor eksternal yakni faktor yang dimana faktor yang tidak ada atau tidak terdapat pada bagian tubuh bank itu sendiri atau tidak dapat dikendalikan oleh bank itu sendiri. Sovia, Sasa Elida (2016).

Faktor-faktor ini sendiri memiliki dampak bagi perkembangan bank,terlebih lagi bagi bank umum syariah. Karena didalam penelitian ini mengambil objek pada bank umum syariah. Dimana faktor internal memiliki dampak yang begitu nyata bagi perkembangan khususnya didalam menyediakan cadangan dana bagi para nasabah. Karena apabila terjadi resiko didalam pembiayaan akibatnya bank harus mampu menyediakan cadangan dana yang lebih besar guna mengurangi resiko. Resiko pembiayaan ini berdampak baik bagi proses manajerial maupun operasional yang seharusnya dapat berjalan dengan semestinya menjadi tidak baik karena adanya resiko pembiayaan yang tidak terkendali oleh bank itu sendiri. Didalam faktor internal sendiri terdapat variabel seperti FDR dan CAR dan yang berpengaruh terhadap NPF. Sovia, Sasa elida (2016).

2.6 Penelitian Terdahulu

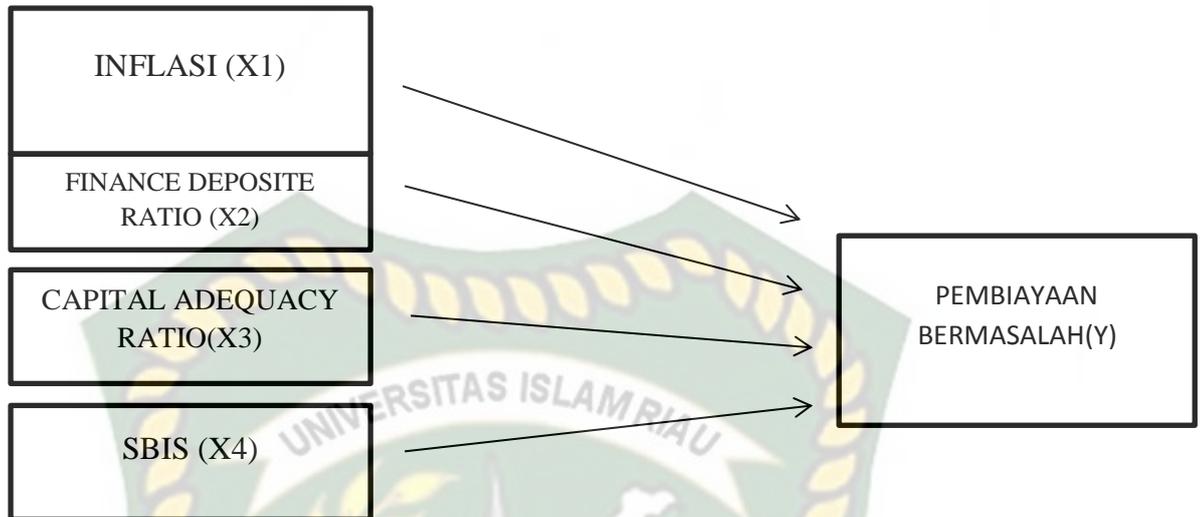
Table 2.1

Penelitian terdahulu

No	Penelitian dan judul penelitian	Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Mares Suci Ana Popita (2013) Analisis Penyebab Terjadinya Non Performing Financing Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia.	Variabel Independen : Gross Domestic Product (GDP) Variabel Dependen: Non Performing Financing (NPF).	Penelitian Kuantitatif.	Menunjukkan Rata-rata masing-masing variabel lebih besar dari nilai standar deviasi.
2	Agustina Kurniawati dan Zulfikar (2014). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah Di Indoensia	Variabel Independen : Gross Domestic Product (GDP) Variabel Dependen: Non Performing Financing (NPF).	Metode kuantitatif.	Berdasarkan hasil pengujian normalitas untuk pengaruh dana pihak ketiga, tingkat bagi hasil dan NPF.

No	Penelitian dan Judul Terdahulu	Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
3	Sova Lusian dan Hermanto siregar (2013). Analisis Faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah di bank pembiayaan rakyat syariah.	Variabel independen: variabel bebas yang signifikan, variabel dengan pengukuran rasio. Variabel dependen: tingkat imbalan, jenis anggunan dan lokasi usaha.	Kuantitatif dan kualitatif.	Factor-faktor yang menjadi penyebab permasalahan non performing financing.
4	Dinnul akbar. Inflasi, GDP, CAR, FDR, terhadap non performing financing pada bank umum syariah.	Variabel independen: GDP Variabel dependen: NPF	Kuantitatif	Mengetahui baik hubungan positif atau negative baik GDP, CAR, FDR terhadap NPF.

2.7 Kerangka Berfikir:



2.8 Hipotesis

Maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

1. Inflasi berpengaruh negative pada pembiayaan bermasalah.
2. Finance to Deposite Ratio (FDR) berpengaruh negative terhadap pembiayaan bermasalah.
3. Capital Aduquacy Ratio (CAR) berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah.
4. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi/Objek Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) annual report bank umum syariah tahun 2015-2018 dan badan pusat statistic (BPS).

3.2 Operasional Variabel

Table 3.1
Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
1. Non Performing Financing (NPF Y).	NPF ialah indikator pembiayaan bermasalah yang perlu diperhatikan karena sifatnya yang fluktuatif dan tidak pasti sehingga pentingnya untuk diamati dengan perhatian	$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}}$	Rasio

	khusus		
2. INFLASI (X1)	Naiknya tingkat harga barang dan jasa secara umum sebelum dan sesudah terhadap total barang dan jasa sesudah.	IHK sekarang-IHK waktu lalu/IHK waktu lalu	Rasio

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
3. Sertifikata Bank Indonesia Syariah (SBIS)(X4)	ialah sumber daya yang dimiliki oleh entitas bisnis. yang mempunyai wujud fisik, seperti kas dan bahan baku habis pakai atau benda yang tak berwujud tetapi memiliki nilai, seperti hak paten.	Nominal tercatat sebagai setoran bank kepada bank Indonesia yang terdapat di www.bi.go.id diganti dengan SBIS sejak tahun 2008 SBIS muncul sebagai pengganti SWBI	Rasio
4. Finance deposite Ratio (FDR)(X2)	Seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposen dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya.	$FDR = \frac{\text{jumlah pembiayaan yang disalurkan}}{\text{Total dana}}$	Rasio
5. Capital Adequacy Ratio (CAR)(X3)	Rasio perbandingan antara modal bank terhadap aktiva tertimbang menurut resiko.	$\frac{\text{Modal Bank}}{\text{ATMR}}$	Rasio

Sumber: jurnal ekonomi 2016

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi merupakan sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Umum syariah (BUS). Sampel merupakan bagian dari populasi mewakili populasi dan tujuan untuk mempermudah melaksanakan penelitian (Cooper, 2006:112) gagasan pengambilan sampel dengan memilih beberapa elemen populasi, kita dapat menarik kesimpulan tentang seluruh populasi. Penelitian ini menggunakan teknik sampling *purposive sampling*. Purposive sampling ialah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu sesuai dengan objek penelitian. Kriteria pemilihan sampel digunakan dalam penelitian ini: Bank umum syariah yang telah berdiri lebih dari 4 tahun dan go public yang menyajikan laporan keuangan dan rasio yang dibutuhkan dalam penelitian ini selama empat tahun berturut-turut dari 2015-2018 dan 10 bank syariah yang terdaftar di otoritas jasa keuangan yang telah disampaikan kepada bank Indonesia.

Tabel 3.2

Bank Umum Syariah yang Terdaftar di OJK

Bank Umum Syariah
1. Bank Aceh Syariah
2. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah
3. Bank Muamalat Indonesia
4. Bank Victoria Syariah
5. Bank BRI Syariah
6. Bank BNI Syariah
7. Bank Syariah Mandiri
8. Bank Mega Syariah
9. Bank Panin Dubai Syariah
10. Bank Syariah Bukopin

Sumber: OJK dan SPS 2018

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini data sekunde atau kuantitatif yaitu sumber data yang diperoleh peneliti dengan cara tidak langsung melalui media perantara atau pihak instansi tertentu, yang telah diolah dan diperoleh dalam bentuk laporan-laporan maupun informasi yang terkait dan diperoleh dari literature dan data-data dari berbagai sumber yang relevan seperti buku dan jurnal. Data yang digunakan dalam penelitian ini

diperoleh dari Bank Indonesia (BI), yang berupa laporan keuangan tahunan Bank-Bank umum syariah yang ada di Indonesia.(2015-2018)

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiono (2013:224) Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Datang uang akan dipakai dalam riset haruslah data yang benar, karena data yang salah akan menghasilkan informasi yang salah pula.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis statistic deskriptif, analisis ini ialah metode analisis sederhana yang bertujuan untuk mempermudah penafsiran dan penjelasan dengan analisis tabel, grafik, atau diagram. Sebelum dilakukan pengujian regresi berganda, terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, multikolonieritas, heterokadastissitas, autokorelasi.

Analisis regresi berganda, yang digunakan untuk mengukur pengaruh INFLASI (X1), FINANCE DEPOSIT RATIO (X2), CAPITAL ADEQUACY RATIO (X3), SBIS (X4) terhadap NPF (kredit bermasalah) yakni variabel dependen. Dapat dihitung dengan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Keterangan :

Y : Pembiayaan Bermasalah (NPF)

α : Konstanta

β_1 - β_5 : Koefisien Regresi

X1 : INFLASI

X2 : Financing Deposito Ratio (FDR)

X3 : Capital Adequacy Ratio (CAR)

X4 : Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)

e : Standar error

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependent, variabel independent atau keduanya memiliki distribusi normal atau tidak.

b. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas bertujuan guna mengetahui apakah model regresi masing-masing variabel independent saling memiliki hubungan secara linier. Model regresi yang baik ialah yang tidak

terdapat korelasi linier atau hubungan yang kuat antara variabel independennya. Ada beberapa cara untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinearitas, yaitu:

R^2 tinggi tetapi uji-t nya guna masing-masing regresinya menunjukkan tidak signifikan. nilai tinggi ialah syarat yang penting untuk terjadinya multikolinearitas, sebab pada nilai yang rendah (<5%) bisa juga terjadi multikolinearitas.

Munggunakan matrix (correlation matrix) dengan menggunakan program eviews.

c. Uji Autokorelasi

Uji ini bertujuan guna menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode saat ini dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka, dinamakanb adanya problem autokorelasi. Masalah ini timbul karena residual tidak bebas dari observasi keobservasi lainnya.model regresi yang baik ialah bebas dari autokorelasi. Pendekatan model tersebut bila terdapat autokorelasi atau tidak bisa dilakukan dengan beberapa pengujian antaranya, uji durbin waston (DW-test) dan uji t (LM-test).

d. Uji Heterokadastisitas

Merupakan keadaan yang menunjukkan faktor pengganggu (error) tidak konstan. Dalam hal ini terjadi korelasi antara faktor pengganggu dengan variabel penjelas. Model regresi yang baik adalah homokadastisitas atau tidak terjadi homokastisitas.

Guna mendeteksi gejala heteroskadastisitas dengan menggunakan uji Glejser yang menguji heteroskastisitas dengan cara mengregresikan variabel independent terhadap nilai residual yang diabsolutkan. Model terbebas dari heteroskadastisitas jika signifikan dari nilai t pada setiap variabel independent lebih besar dari 0,005. Sedangkan jika signifikan dari nilai t pada setiap variabel independent lebih kecil dari 0,005 maka terjadi heteroskadastisitas.

2. Pengujian Hipotesis

Suatu pengujian hipotesis statistic ialah cara yang mungkin dapat dibuat yaitu keputusan guna menolak dan menerima hipotesis yang sedang diuji diberi symbol H_0 (Hipotesis alternative). Untuk menginterprestasikan hasil regresi yang diperoleh maka penulis melakukan uji hipoteisis dengan menggunakan Uji-t, Uji-f dan Uji- R^2

a. Uji t

Uji t ialah pengujian masing-masing variabel bebas secara sendiri-sendiri yang dilakukan guna melihat signifikan dari pengaruh variabel independent terhadap variabel dependent dengan menganggap variabel dependent lain constant (ceteris paribus).

$H_0 : \beta_1 = 0$ artinya variabel independent tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependent.

$H_0 : \beta_1 \neq 0$ artinya ada pengaruh yang signifikan antara variabel independent dengan variabel dependent.

b. Uji f (simultan)

Uji f digunakan guna menguji hubungan semua variabel independent terhadap variabel dependent secara bersama.

$H_0 : \beta_0 = \beta_1 = \beta_2 = 0$ artinya variabel independent secara serentak tidak mempengaruhi variabel dependent.

$H_0 : \beta_0 \neq \beta_1 \neq \beta_2 = 0$ artinya variabel independent secara serentak mempengaruhi variabel dependent.

Dimana : $F_{\text{tabel}} = df (N-k; k-1)$

c. Koefisien Determinasi (Uji R^2)

Koefisien determinasi (R^2) ialah suatu ukuran guna menguji seberapa jauh model regresi yang mempunyai kemampuan dalam menjelaskan variabel dependent dengan memiliki nilai koefisien

determinasi (R^2) antara nol dan satu. Semakin besar nilai R^2 maka variabel independent terdapat pengaruh atau hubungan untuk mendeteksi koefisien variabel dependent dan semakin kecil nilai angka R^2 maka variabel ini tidak ada hubungan karena keterbatasan dari model regresi itu sendiri.

3. Variabel Penelitian

Variabel dependen, variabel dependen dalam penelitian ini adalah NPF (Y) yang angka menjelaskan besarnya pembiayaan bermasalah bank yaitu pengembalian pembiayaan yang disalurkan oleh bank. Non Performing Financing merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur resiko kredit yang diberikan bank kepada pihak debitur. Bank Indonesia menetapkan bahwa bank harus menjaga nilai dari rasio NPL nya untuk berada di bawah 5%, jika memiliki nilai rasio lebih dari 5% maka bank dikatakan tidak sehat.

Sedangkan variabel independen meliputi INFLASI, FDR, CAR, SBIS sebagai (X_1, X_2, X_3, X_4). Inflasi ialah naiknya barang dan jasa dalam periode waktu tertentu, variabel inflasi dapat dihitung dari angka yang tercantum didalam data statistic. Penyebab inflasi sendiri meliputi, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas dipasar yang memicu konsumsi

bahkan spekulasi, tidak lancarnya distribusi barang rumus inflasi yaitu:

1. Indeks harga konsumen (IHK) consumer price index.
Mengukur harga rata-rata barang yang dibeli oleh konsumen.
2. Deflator PDB menghitung besarnya perubahan harga semua barang baru, barang produksi lokal, barang jadi dan jasa.
3. Indeks harga produsen indeks yang mengukur harga rata-rata barang-barang yang dibutuhkan produsen untuk melakukan produksi.
4. Indeks harga komoditas indeks mengukur harga barang-barang tertentu.

Cara menghitung inflasi menggunakan IHK dengan rumus:

$$\frac{(\text{IHK yang sekarang} - \text{IHK waktu yang lalu})}{\text{IHK sekarang}} \times 100\%$$

Sertifikat wadiah Bank Indonesia (SWBI) ialah variabel ydapat digunakan bank syariah dalam mengendalikan kelebihan likuiditasnya. Namun menggunakan prinsip bagi hasil tidak boleh diperjual belikan. Hal ini sesuai dengan (fatwa MUI No. 30/DSN MUI/X/2002). Dan penelitian ini variabel SWBI merupakan nominal yang tercatat sebagai setoran bank kepada bank Indonesia SBIS.

Financing Deposito Ratio (FDR) mengatakan seberapa jauh kemampuan bank membayar kembali penarikan dana dilakukan

deposan dengan mengndalkan kredit yang telah diberikan sebagai sumber kuliditasnya, perhitungan variabel FDR sbb:

$$\text{FDR} = (\text{Jumlah Pembiayaan yang disalurkan}) / (\text{Total Dana})$$

Selain itu digunakan juga uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskadastistisitas, uji korelasi, uji F, uji T, koefisien determinasi dalam menguji persamaan dalam penelitian yang dilakukan.



BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

4.1 Sejarah Bank Syariah

Bank syariah berdiri sejak tahun 1963 di kota kecil yakni Mit Ghamr sebagai sebuah project dalam bentuk tabungan pedesaan di negara Mesir. Dan selanjutnya bank syariah berkembang di Pakistan pada tahun 1965 yakni dalam bentuk yang berbeda yaitu koperasi. Pada pertengahan tahun 1970-an gerakan untuk membangkitkan bank syariah mulai hidup kembali yang awal mula ditandai dengan berdirinya Islamic Development Bank pada 20 oktober 1975, yakni sebagai lembaga keuangan internasional islam multilateral. Dan hal ini dianggap sebagai pemicu bermunculannya bank syariah diberbagai negara, seperti Dubai Bank di Dubai (1975). Faisal Islamic Bank di Mesir dan Sudan (1977) dan Kuwait Finance House di Kuwait (1977) .Dan hingga sampai saat ini lebih dari 200 bank dan lembaga keuangan syariah yang beroperasi di lebih 70 negara baik negara muslim maupun nonmuslim sekalipun.

Berdasarkan data statistic pada OJK jumlah bank umum syariah setiap tahunnya selalu bertambah, sapai tahun 2017, bank umum syariah di Indonesia yakni 13 bank. Dalam prosesnya bank umum syariah mampu menyediakan dan memberikan kepuasan kepada nasabah. Sehingga meningkatkan pelayanan dan produk-produk syariah. Salah satunya yakni

meningkatkan pelayanan internet banking. Sampai sekarang layanan ini telah diterapkan dan sudah ada di bank umum syariah di Indonesia.

4.2 Gambaran Umum Bank Syariah

1. Bank Aceh Syariah

Gagasan awal mendirikan Bank Milik Daerah di Aceh teretus atas prakarsa Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Provinsi Atjeh yang sekarang lebih dikenal Pemerintah Provinsi Nangroe Aceh Darusallahm). Yakni pada 7 september 1957.

Pada tahun 1963 dibentuk la UU No. 12 tahun 1963 hukum berdirinya bank aceh yang menegaskan, pembangunan bank aceh syariah ialah guna menyediakan pembiayaan bagi pelaksanaan usaha-usaha pembangunan daerah dalam rangka pembangunan nasional semesta berencana. Tepatnya 10 tahun kemudia tgl 17 april 1973 gubernur aceh mengeluarkan surat keputusan No. 54/1973 mengenai pengalihan PT Bank Kesejahteraan Aceh , NV menjadi Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Pengalihan status baik secara hukum hak dan kewajiban dll secara resmi terlaksana pada 6 agustus 1973 dan ditetapkan sebagai hari lahirnya bank pembangunan daerah istimewa aceh.

mewujudkan bank aceh menjadi bank yang terus sehat, tangguh, haldal dan terpercaya serta dapat memberikan nilai tambah yang tinggi kepada mitra dan masyarakat.

2. bank NTB syariah

Bank Nusa Tenggara Barat syariah ialah bank milik pemerintah provinsi NTB bersama pemerintah kota atau kabupaten se NTB. Yang berdiri pada 5 juli 1964 berdasarkan:

- Peraturan daerah provinsi NTB No. 06 tahun 1963 tentang pendirian bank pembangunan daerah Nusa Tenggara Barat beserta beberapa perubahannya
- Disempurnakan dengan peraturan daerah provinsi No. 08 tahun 1984 tentang bank tersebut.
- Kemudian dirubah kembali No. 01 tahun 1993 tentang bank tersebut.
- Dan berubah bentuk hukum perseroan terbatas (PT) bank pembangunan daerah NTB tgl 19-3-1999.

Persiapan berdirinya bank NTB syariah dimulai oleh bapak H.Muhammad Syareh, SH dimana direktur utama bank NTB syariah. Tujuan untuk menjadi bank syariah yang amanah, terkemuka dan menjadi harapan tentunya guna meningkatkan perekonomian daerah di nusa tenggara barat.

Seiring berjalannya waktu bank NTB syariah telah mempunyai kantor berjumlah 43 yang terdiri dari satu kantor pusat, sebelas kantor cabang, dua puluh dua kantor cabang pembantu, empat kantor kas dan lima payment point. Memiliki 155 atm dan 740 orang karyawan.

3. Bank muamalat syariah

Memulai bisnis syariahnya pada 1 november 1991 atau 24 rabi'us tsani 1412 H. yang digagas oleh MUI, ICMI dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari pemerintah republic Indonesia. Produk bank muamalat syariah antara lain. 27 oktober 1994 bank muamalat Indonesia mendapatkan izin bank Devisa dan terdaftar sebagai perusahaan public yang tidak listing di Bursa Efek Indonesia (BEI). Karena hal ini membuat bank muamalat semakin diakui eksistensinya sebagai bank syariah di Indonesia.

Pada tahun 2009 bank muamalat melebarkan sayap hingga ke luar negeri yakni kuala lumpur, Malaysia dan menjadi bank pertama di Indonesia serta satu-satunya yang mampu mewujudkan ekspansi bisnis hingga ke Malaysia. Sampai sekarang bank muamalat telah memiliki kantor sebanyak 325 yakni kantor layanan termasuk 1 di Malaysia. Selain itu bank muamalat memiliki 710 unit ATM, 120.000 jaringan ATM bersama dan ATM prima serta lebih dari 11.000 jaringan ATM di Malaysia yakni melalui Malaysia electronic payment (MEPS).

4. Bank Victoria Syariah

PT. Bank Victoria Syariah didirikan untuk pertama kali yakni dengan nama PT Bank Swaguna berdasarkan Akta nomor 9 tgl 15 april 1966.setelah banyaknya perubahan yang dilalui oleh bnak victoria syariah mulai dari bank umum konvensional menjadi bnak umum syariah dan

mendapat izin Indonesia berdasarkan keputusan gubernur bank Indonesia nomor 12/8/KEP.GBI/Dpg/2010 februari 2010.

Banyak dukungan penuh dari perusahaan induk PT bank Victoria internasional tbk dan hal itu sangat membantu tumbuh kembang bank Victoria syariah yang selalu terus berkomitmen guna membangun kepercayaan nasabah dan masyarakat melalui pelayanan dan penawaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta memenuhi kebutuhan nasabah.

5. Bank BRI syariah

BRI syariah beroperasi 17 november 2008 nama PT Bank BRI syariah dan kegiatan berdasarkan agama islam. Pada tgl 1 januari 2009 dengan penandatanganan yang dilakukan oleh Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT Bank BRI dan Ventje Raharjo selaku dirut utama pt bank BRI syariah.

Tujuan BRI Syariah yakni guna menghadirkan bisnis keuangan berlandaskan pada prinsip-prinsip luhur perbankan syariah, bank berkomitmen guna produk layanan terbaik yang mampu menentramkan, BRI syariah terus tumbuh secara positif. Hal ini difokuskan dengan membidik berbagai segmen di masyarakat. Basis nasabah terbentuk secara luas di seluruh penjuru Indonesia dapat menunjukkan bahwa BRI syariah memiliki kapasitas tinggi sebagai bank ritel modern yang terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah.

6. Bank Mandiri Syariah

BSM hadir pada 1999 sekaligus pasca krisis moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui krisis ekonomi dan moneter sejak juli 1997 yang disusul dengan krisis multi dimensi termasuk dipanggung politik nasional telah menimbulkan beragam dampak negative sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat. Tidak terkecuali, dunia usaha. Dan saat yang bersamaan pemerintah melakukan penggabungan antara empat bank yakni meliputi bank dagang negara, bank bumi daya, bank exim dan bapindo. Menjadi satu bank yakni PT bank Mandiri (persero) pada 31 juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menetapkan dan menempatkan PT bank mandiri (persero) Tbk sebagai pemilik mayoritas baru BDB.

Pembentukan tim merger ini bertujuan guna mengembangkan layanan perbankan syariah dikelompok perusahaan bank mandiri sebagai respon atas diberlakukannya UU No 10 tahun 1998 yang memberi peluang bank umum guna melayani transaksi syariah (dual banking system).

7. Bank BNI Syariah

Berdasarkan keputusan gubernur Bank Indonesia nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT Bank BNI syariah. Dan didalam Corporate Plan UUS yang bersifat temporer dan dilakukan spin off tahun 2009 dan rencana ini akan terlaksana pada 19 juni 2010 dengan berporasinya BNI syariah sebagai

bank umum syariah (BUS). Komitmen pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat.

Disamping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah dikantor cabang BNI konvensional. Didalam pelaksanaannya operasional perbankan BNI syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap berbagai aspek syariah. Dengan dewan pengawas syariah (DPS) yang saat ini diketuai oleh KH.Ma'ruf Amin. Semua produk BNI syariah telah melalui tahap pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi standar syariah.

Hingga saat ini jumlah cabang BNI syariah telah mencapai 65 kantor cabang dan 161 kantor cabang pembantu 17 kantor cabang kas 22 mobil layanan gerak serta 20 payment point.

8. Bank Mega Syariah

Bank mega syariah berawal dari usaha Asuransi Tugu yaitu PT Bank Umum Tugu (Bank Tugu) yakni berdiri pada 14 juli 1990. Setelah sekian banyak pergantian dan tepatnya pada 2 november 2010 menjadi PT Bank Mega Syariah. Dan tepatnya 16 oktober 2008 menjadi bank devisa dan kemudian pada 8 april 2009 memperoleh izin dari kementerian agama RI sebagai bank penyelenggaraan ibadah haji.

Dalam perjalanannya bank mega syariah telah melakukan perubahan terhadap logo mereka dengan bentuk dan warna yang signifikan dengan logo bank mega serta kepindahan kantor pusatnya ke Menara mega

syariah kuningan Jakarta. Bank mega syariah sendiri memiliki komisaris utama yakni Prof.DR.IR.H.Mohammad Nuh,DEA. Komisaris Rachmat Maulana dan Prof.DR.H.Nasarudin Umar, MA.

9. Bank Panin Syariah

Bank panin syariah berdiri di malang pada 8 januari 1972 dengan nama PT Bank pasar bersaudara djaja. Dan secara resmi memperoleh izin pada 6 oktober 2009 dsn kemudian beroperasi sebagai bank syariah pada tanggal 2 desember 2009. Selain itu bank panin juga mendapat persetujuan menjadi bank devisa dari OJK 8 desember 2015.

Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham bank panin dubai syariah tbk, yaitu, bank panin (induk usaha) (5,22%) dan dubai Islamic bank (38,25%). Berdasarkan anggaran dasar perusahaan ruang lingkup kegiatan PNBS ialah dapat menjalankan kegiatan jasa umum perbankan dengan prinsip syariah (Bank Umum Syariah).

Dengan visi misi yakni, menjadi bank syariah progresif di Indonesia yang menawarkan produk dan layanan keuangan komperhensif dan inovatif. Mampu mewujudkan perseroan bank syariah yang lebih sehat dengan tata kelola yang lebih baik serta pertumbuhan berkelanjutan. Sebagai bank pilihan dalam pengembangan usaha melalui produk-produk dan layanan unggulan yang dapat berkompetisi dengan produk bank syariah maupun konvensional. Mampu memberikan kesempatan pengembangan karier dalam industry perbankan syariah melalui semangat

kebersamaan dan kesinambungan lingkungan social. Meningkatkan keunggulan dalam pelayanan syariah berbasis teknologi informasi yang mampu memnerikan pelayanan yang baik dan berkualitas bagi para nasabah.

10. Bank Bukopin Syariah

Untuk mengembangkan bisnis perusahaan bank bukopin terlibat dalam asistensi operasional bank persyarikatan Indonesia dan mendapatkan tambahan modal diberika oleh bank bukopin syariah. Dan setelah beberpa tahun dibantu oleh bank bukoin syariah akhirnya banj perserikatan Indonesia merubah haluan manjadi bank konvensional.

PT Bank syariah Bukopin secara resmi beroperasi pada 9 desember 2008, yang kegiatan usahanya dibuka oleh bapak M.Jusuf Kalla selaku wakil Presiden. Setelah sekian banyak drama pengakusisian pada bank ini, maka dengan secara resmi bank bukopin syariah beroperasi demi melayani masyarakat dengan sepenuh hati dan dengan tujuan awal yakni memberrikan pelayanan terbaik bagi nasabah.

Visi misi bank bukopin syariah diantaranya, mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, membentuk sumber daya insani yang professional dan amanah, memfokuskan pengembangan usaha pada sector UMKM, meningkatkan nilai tambah kepada para pemegang saham.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil pengolahan data yang diteliti berdasarkan teknik analisis data ditentukan sebelumnya. Sampel berjumlah 10 bank umum Syariah yang ada di Indonesia dan telah diseleksi. Dan laporan keuangan tahunan setiap bank umum syariah periode 2015 – 2018 sesuai variabel pada penelitian. Berikut jumlah sampel pada penelitian ini:

TABEL 5.1

Sampel Penelitian

Nama Bank Umum Syariah Di Indonesia
1. Bank Aceh Syariah
2. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah
3. Bank Muamalat Indonesia
4. Bank Victoria Syariah
5. Bank BRI Syariah
6. Bank BNI Syariah
7. Bank Syariah Mandiri
8. Bank Mega Syariah
9. Bank Panin Dubai Syariah
10. Bank Syariah Bukopin

Sumber: Data diolah, 2020

Teknik analisis data penelitian ini menggunakan SPSS (Statistical Product and Service Solution), terlebih dahulu diolah sesuai dengan rumus, kemudian Regresi Linier Berganda 79 dan analisis deskriptif seperti uji asumsi klasik normalitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas dan autokorelasi. Kemudian dilanjutkan dengan pengujian hipotesis.

5.1 Analisis Deskriptif Data

5.1.1 Analisis Non Performing Financing (NPF)

Non Performing Financing (NPF) ialah indikator pembiayaan bermasalah yang perlu diperhatikan karena sifatnya yang fluktuatif dan tidak pasti sehingga pentingnya untuk diamati dengan perhatian khusus. NPF ialah salah satu instrument penilaian kinerja sebuah bank syariah yang menjadi interpretasi penilaian pada aktiva produktif. Khususnya dalam penilaian pembiayaan bermasalah.

Dengan rumus:

$$\text{Non Performing Financing} = \frac{\text{Pembiayaan (k.l.d.m)}}{\text{Total pembiayaan}}$$

Indikasi pembiayaan bermasalah dapat dilihat dari perilaku rekening (*accaccount attitudes*), perilaku kegiatan bisnis (*business activities attitude*), perilaku nasabah (*customer attitudes*) dan

perilaku makro ekonomi (*economic marco attitudes*). Sedangkan factor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah dapat disebabkan oleh tiga unsur yakni:

1. Bank itu sendiri (kreditur).
2. Pihak debitur.
3. Pihak kreditur dan debitur tersebut.

Berikut ini nilai Non Performing Financing pada bank umum syariah 4 tahun terakhir periode 2015 – 2018 pada tabel berikut:

Tabel 5.2
Data Non Performing Financing (NPF)
Periode 2015 – 2018

No	Nama Bank	NPF(%)			
		2015	2016	2017	2018
1	Aceh Syariah	2.30	1.39	1.38	1.04
2	NTB Syariah	1.31	1.20	1.35	1.63
3	Muamalat Syariah	7.11	3.83	4.43	3.87
4	Victoria Syariah	9.80	7.21	4.43	4.00
5	BRI Syariah	4.86	3.19	4.59	4.97
6	BNI Syariah	2.53	2.94	4.72	2.93
7	Mandiri Syariah	6.06	4.92	2.89	3.28

8	Mega Syariah	4.26	3.30	4.53	2.15
9	Panin Syariah	2.63	2.26	2.95	4.81
10	Bukopin Syariah	2.99	7.63	7.85	5.71
	Rata-rata	4.38	3.79	3.47	3.43

Sumber: Data diolah,2020

Dilihat dari tabel diatas nilai NPF penelitian ini memberikan gambaran bervariasi. Dilihat perubahan nilai NPF setiap tahunnya oleh bank umum syariah yang dijadikan sampel pada penelitian ini. Berdasarkan peneliti, bank umum syariah yang memiliki nilai NPF tertinggi adalah pada Bank Victoria Syariah yang memiliki nilai NPF tertinggi pada tahun 2015 yakni dengan nilai 9.80 dan mengalami penurunan yang cukup signifikan ditahun-tahun berikutnya.

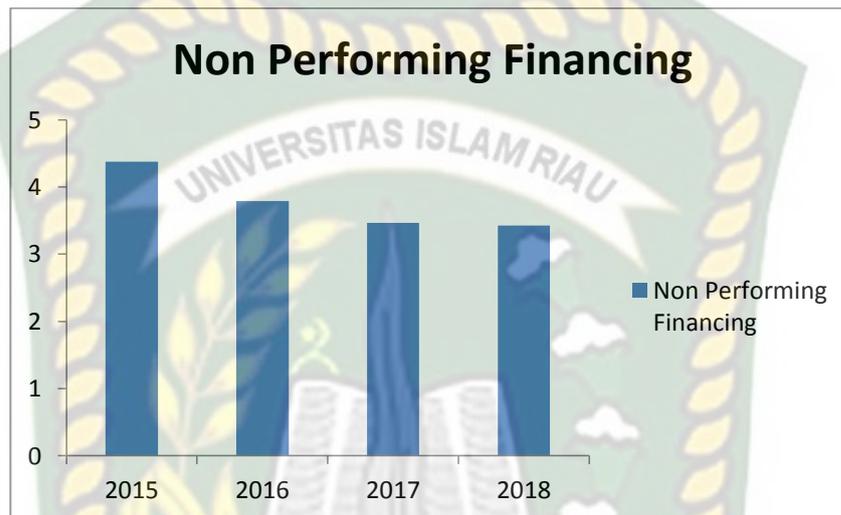
Yakni 7.21 tahun 2016, 4.59 tahun 2017 dan 4.00 tahun 2018. Menunjukkan tren positif dimana NPF bank yang awalnya tinggi dapat menurun cukup baik sehingga mengurangi resiko pembiayaan yang dapat timbul.

Sedangkan nilai NPF terendah pada Bank NTB Syariah dengan nilai NPF terendah yaitu 1.20 tahun 2016, hal ini sangat baik untuk bank, dimana bank dapat lebih memaksimalkan penyaluran dananya demi kesejahteraan nasabah dan tentunya mengurangi resiko pembiayaan bermasalah atau kredit macet. Berdasarkan pengamatan terhadap seluruh nilai NPF pada

penelitian ini, untuk lebih mudahnya dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 5.1

Grafik Data NPF Pada Bank Syariah



Sumber: Data diolah,2020

Gambar 5.1 perkembangan NPF pada bank syariah yang dijadikan pada sampel penelitian ini. Tahun 2015 penurunan yang cukup signifikan secara berturut-turut dari tahun 2015 sampai 2018. Dengan nilai NPF tahun 2015 4,38 tahun 2016 3,79 tahun 2017 3,47 dan tahun 2018 3,43. Dimana hal ini tentunya merupakan hal baik bagi bank umum syariah yang dapat mengontrol resiko pembiayaan bermasalah, karena semakin rendah tingkat NPF pada bank maka semakin kecil pula resiko pembiayaan yang harus ditanggung oleh bank umum syariah.

5.1.2 Analisis Finance to Deposit Ratio (FDR)

Financing Deposit Ratio (FDR) ialah variabel yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap NPF pada perbankan syariah. Karena variabel FDR sangat tinggi dan mencapai 100 persen. Dengan persentase yang tinggi tersebutlah dikatakan bahwa variabel FDR ini memiliki pengaruh terhadap NPF. Yang apabila nilai tinggi ini tidak didukung dengan loon Review serta pengawasan baik akan menjadi boomerang sendiri bagi bank syariah dimana dapat meningkatkan pembiayaan yang bermasalah atau kredit macet. Menurut Dinnul Alfian Akbar (2016:2).

Financing Deposito Ratio (FDR) mengatakan kemampuan bank membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber kuliditasnya, perhitungan variabel FDR sebagai berikut:

$$\text{FDR} = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan yang disalurkan}}{\text{Total DPK}}$$

Berikut rasio keuangan FDR ditinjau berdasarkan data pada bank umum syariah tahun 2015 – 2018 sebagai berikut:

Tabel 5.3

Data FDR Pada Sektor Perbankan Periode 2015 – 2018

No	Nama Bank	FDR(%)			
		2015	2016	2017	2018
1	Aceh Syariah	84.04	84.59	69.44	71.98
2	NTB Syariah	100.87	97.66	75.07	98.93
3	Muamalat Syariah	90.30	95.13	84.41	73.18
4	Victoria Syariah	95.29	100.67	83.57	82.78
5	BRI Syariah	84.16	81.42	71.87	75.49
6	BNI Syariah	91.94	84.57	80.21	79.62
7	Mandiri Syariah	81.99	79.19	77.66	77.25
8	Mega Syariah	98.49	95.24	91.05	90.88
9	Panin Syariah	96.43	91.99	86.95	88.82
10	Bukopin Syariah	90.56	88.18	82.44	93.40
	Rata-rata	91.40	89.86	80.26	83.23

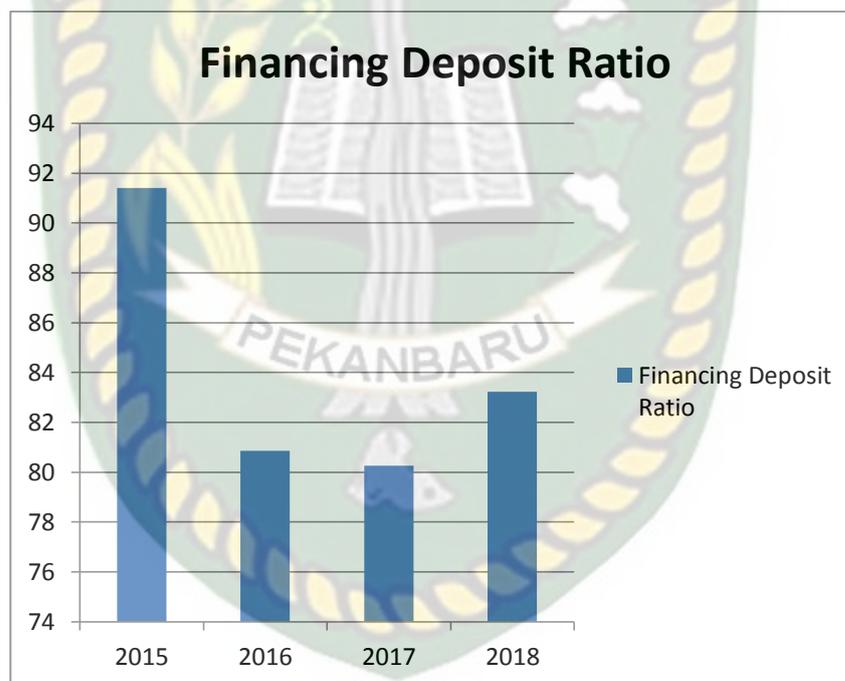
Sumber: Data diolah,2020

Tabel 5.3 bahwa perhitungan FDR ini menunjukkan keefektifan perbankan dalam mengelola keuangan bank dan menghasilkan profit yang berkaitan dengan ketersediaan cadangan dana pada perbankan. Dimana nilai FDR tertinggi terdapat pada bank umum Syariah NTB yang nilai FDR nya mencapai 100.87 persen pada tahun 2015, dimana dengan tingginya nilai FDR ini merupakan resiko yang cukup besar pengaruhnya terhadap NPF, oleh karena itu diperlukan pengawasan yang baik dalam proses ini agar bank umum syariah tersebut terhindar dari resiko pembiayaan

bermasalah atau kredit macet. Sedangkan nilai FDR terendah yakni 6.44 persen pada bank Aceh syariah pada tahun 2016. Hal ini tentunya sangat baik bagi bank, agar dapat lebih baik lagi dalam mengontrol pergerakan pembiayaan bermasalah atau NPF. Berdasarkan pengamatan seluruh nilai FDR penelitian ini, untuk lebih mudahnya dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik5.2

Grafik Data FDR Pada Perbankan Syariah



Sumber: Data diolah, 2020

Grafik 5.2 dapat dilihat perkembangan FDR pada bank syariah yang dijadikan pada sampel penelitian ini. Pada tahun 2015 turun cukup signifikan secara berturut-turut dari tahun 2015 sampai 2018. Dengan nilai FDR tahun 2015 91,40 tahun 2016 89,86 tahun

2017 80,26 dan tahun 2018 83,23. Hal ini tentunya merupakan hal baik atau positif bagi bank umum syariah. Dimana tingkat FDR yang tinggi akan memberikan kontribusi yang besar terhadap NPF. Dan dibutuhkan pengawasan yang baik agar dapat meminimalkan resiko yang akan terjadi pada pembiayaan.

5.1.3 Analisis Capital Adequacy Ratio (CAR)

Modal adalah salah satu faktor penting bagi bank guna mengembangkan usahanya juga beresiko menampung kerugian. Modal dimiliki oleh bank tersebut pada dasarnya harus mampu dan cukup guna menutupi seluruh resiko usaha yang tengah dihadapi oleh bank tersebut. Disini modal diwakili oleh rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) dimana CAR memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva pada bank yang mengandung resiko dan biaya yang berasal dari modal sendiri.

Karena semakin tinggi CAR semakin besar pula sumber daya finansial yang tentunya dapat digunakan guna keperluan pengembangan usaha dan juga dapat mengantisipasi kerugian yang diakibatkan karena penyaluran kredit bermasalah atau macet. Menurut Dinnul Alfian Akbar (2016:2).

CAR juga dapat dikatakan sebagai rasio perbandingan antara modal bank terhadap aktiva tertimbang menurut resiko. CAR dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Capital Adequacy Ratio} = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{ATMR}}$$

Berikut ini disajikan rasio keuangan CAR yang ditinjau berdasarkan data perbankan umum Syariah periode 2015 – 2018 sebagai berikut:

Tabel 5.4
Data CAR Pada Sektor Perbankan Periode 2015 – 2018

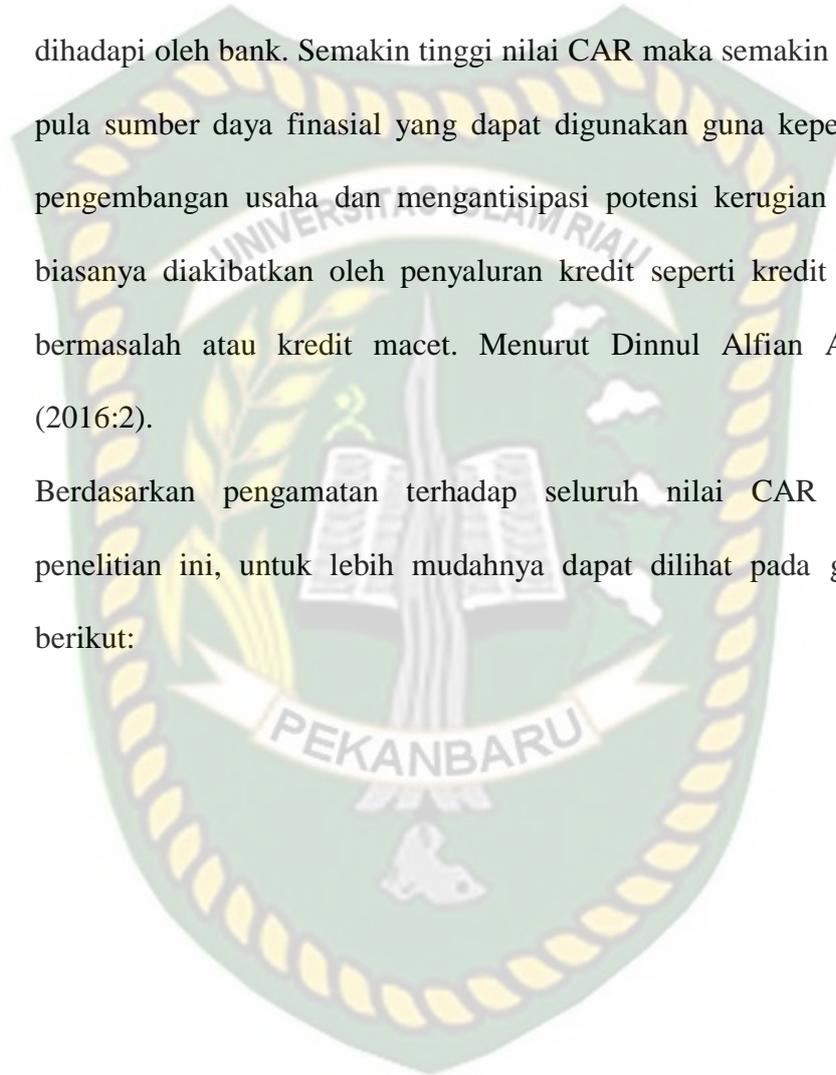
No	Nama Bank	CAR (%)			
		2015	2016	2017	2018
1	Aceh Syariah	19.44	20.74	21.50	19.67
2	NTB Syariah	27.12	31.17	30.87	35.42
3	Muamalat Syariah	12.00	12.74	13.62	12.34
4	Victoria Syariah	16.14	15.98	19.29	22.07
5	BRI Syariah	13.94	20.63	20.05	29.72
6	BNI Syariah	15.48	14.92	20.14	19.31
7	Mandiri Syariah	12.85	14.01	15.89	16.26
8	Mega Syariah	18.74	23.53	22.19	20.54
9	Panin Syariah	20.30	18.17	11.51	23.15
10	Bukopin Syariah	16.31	15.15	19.20	19.31
	Rata-rata	17.23	18.70	19.42	21.79

Sumber: Data diolah, 2020

Dari tabel 5.4 dari pengamatan yang telah dilakukan peneliti, dapat dilihat bahwa nilai CAR ini menunjukkan bagaimana keefektifan perbankan dalam mengelola modal bank dan menghasilkan profit yang berkaitan dengan ketersediaan

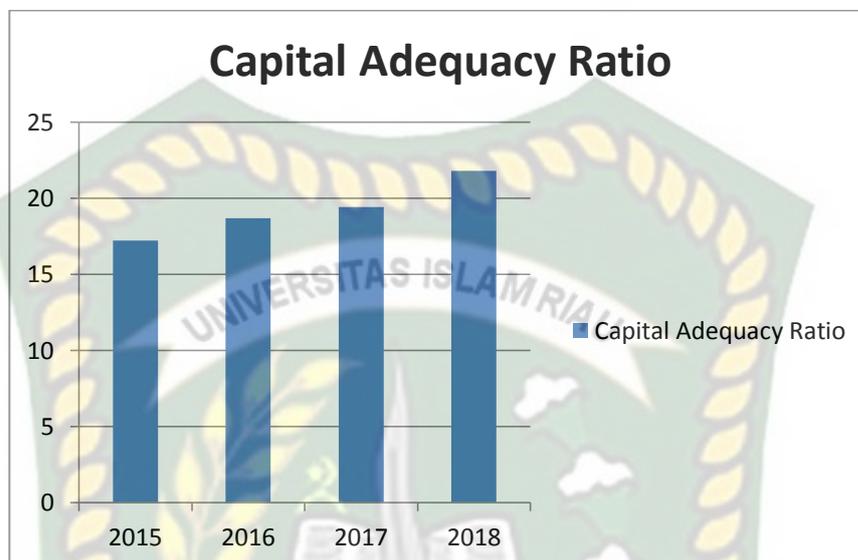
cadangan dana pada perbankan. Dimana nilai CAR tertinggi terdapat pada bank umum Syariah NTB yang nilai CAR nya mencapai 35.42 persen pada tahun 2018, dimana dengan modal yang tinggi maka dapat menutupi seluruh resiko usaha yang dihadapi oleh bank. Semakin tinggi nilai CAR maka semakin besar pula sumber daya finansial yang dapat digunakan guna keperluan pengembangan usaha dan mengantisipasi potensi kerugian yang biasanya diakibatkan oleh penyaluran kredit seperti kredit yang bermasalah atau kredit macet. Menurut Dinnul Alfian Akbar (2016:2).

Berdasarkan pengamatan terhadap seluruh nilai CAR pada penelitian ini, untuk lebih mudahnya dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik 5.3

Grafik Data CAR Pada Perbankan Syariah



Sumber: Data diolah, 2020

Berdasarkan gambar 5.3 dapat dilihat bahwa perkembangan CAR pada perbankan syariah yang dijadikan pada sampel penelitian ini. Pada tahun 2015 mengalami kenaikan yang cukup signifikan secara berturut-turut dari tahun 2015 sampai 2018. Dengan nilai CAR tahun 2015 17.23 tahun 2016 18.70 tahun 2017 19.42 dan tahun 2018 21.79. Hal ini tentunya merupakan hal baik atau positif bagi bank umum syariah. Dimana tingkat CAR yang tinggi akan memberikan kontribusi yang besar terhadap NPF. Karena semakin tinggi nilai CAR maka semakin besar pula sumber daya finansial yang dapat digunakan untuk keperluan pengembangan usaha dan juga mengantisipasi terjadinya potensi akibat penyaluran kredit bermasalah.

5.1.4 Analisis Inflasi

Inflasi secara umum dapat diartikan sebagai naiknya harga barang dan jasa sebagai akibat adanya jumlah uang atau permintaan yang lebih banyak dibandingkan dengan jumlah barang dan jasa yang tersedia atau penawaran. Inflasi akan mempengaruhi kegiatan ekonomi baik secara makro maupun mikro dan investasi. Dimana antara inflasi dan kredit bermasalah akan terjadi perubahan daya beli masyarakat. Dan konsumsi barang dan jasa turun artinya permintaan akan dan juga jasa akan ikut menurun. Dengan asumsi penawaran konstan yang akhirnya mempengaruhi kapasitas debitur hal ini produsen dalam pengembalian pinjamannya. Angsuran menjadi semakin tidak tepat dan menimbulkan kualitas kredit buruk dan bahkan akan menimbulkan kredit bermasalah. Menurut Dinnul Alfian Akbar (2016:2).

Menggunakan indeks harga konsumen (IHK) konsumen price index. Cara ini mengukur harga rata-rata dari barang yang dibeli konsumen. Deflator PDB yaitu dengan menghitung besarnya perubahan harga dari barang baru, barang produksi lokal, barang jadi dan jasa.

Cara menghitung inflasi menggunakan IHK dengan rumus:

$$(\text{IHK yang sekarang} - \text{IHK waktu yang lalu}) / \text{IHK sekarang} \times 100\%$$

Berikut ini disajikan data inflasi yang ditinjau berdasarkan data badan pusat statistic perbankan periode 2015 – 2018 sebagai berikut:

Tabel 5.5

Data INFLASI Pada Sektor Perbankan Periode 2015 – 2018

TAHUN	INFLASI (%)
2015	3.35%
2016	3.02%
2017	3.61%
2018	3.13%

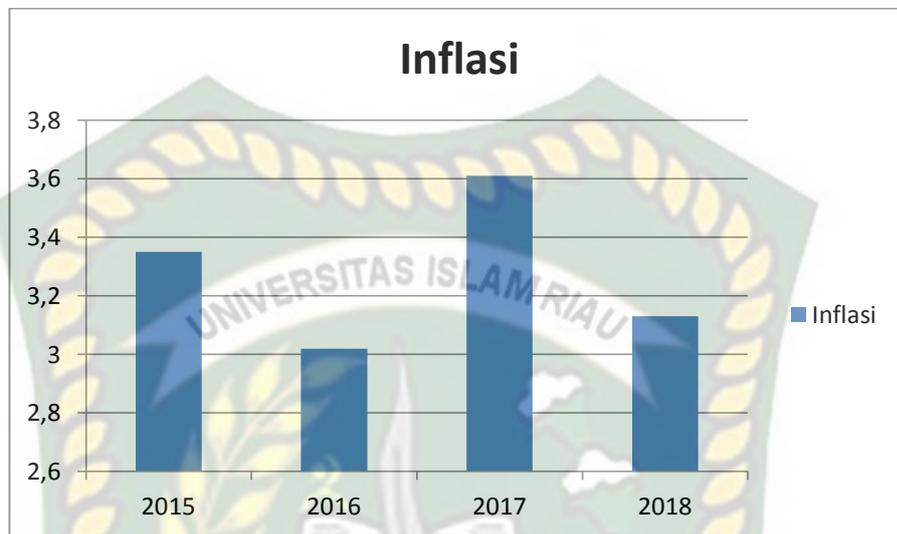
Sumber: Data diolah, 2020

Dari tabel 5.5 diatas dapat dilihat data inflasi yang terjadi pada pada tahun 2015 sampai 2018 yang mengalami penurunan. Dimana inflasi terendah terjadi pada tahun 2016 yakni dengan tingkat inflasi 3.02 persen dan inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2017 dengan tingkat inflasi mencapai 3.61 persen.

Dengan demikian inflasi mempengaruhi kegiatan ekonomi secara makro maupun mikro termasuk juga investasi. Berdasarkan pengamatan terhadap data inflasi penelitian ini, untuk lebih mudahnya dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 5.4

Grafik Data INFLASI Pada Perbankan Periode 2015-2018



Sumber: Data diolah, 2020

5.1.5 Analisis Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)

Sertifikat wadiah Bank Indonesia (SWBI) ialah variabel yang digunakan perbankan syariah dalam mengendalikan kelebihan likuiditasnya, namun menggunakan prinsip bagi hasil tidak boleh diperjual belikan. Hal ini sesuai dengan (fatwa MUI No. 30/DSN MUI/X/2002). Dan dalam penelitian ini variabel SWBI merupakan nominal yang tercatat sebagai setoran kepada bank Indonesia. SWBI adalah nominal tercatat sebagai setoran bank kepada bank Indonesia

Berikut ini disajikan data SBIS yang ditinjau berdasarkan data otoritas jasa keuangan perbankan periode 2015 – 2018 sebagai berikut:

Tabel 5.6

Data SBIS Pada Sektor Perbankan Periode 2015 – 2018

TAHUN	SBIS (MILLION)
2015	3.385
2016	7.940
2017	5.105
2018	4.245

Sumber: Data diolah, 2020

Dari tabel 5.6 diatas memperlihatkan data sertifikat bank Indonesia syariah dari tahun 2015 sampai 2018. Dimana data tertinggi pada tahun 2016 dengan nilai 7.940 dan yang terendah pada tahun 3.385. dilihat secara keseluruhan data SBIS cukup baik. Berdasarkan pengamatan terhadap data SBIS pada penelitian ini, untuk lebih mudahnya dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 5.5

Grafik Data SBIS Pada Perbankan Periode 2015-2018



Sumber: Data diolah, 2020

5.1.6 Pemilihan Model Regresi Data Panel

Regresi data panel memiliki gabungan karakteristik yaitu data yang terdiri atas beberapa objek dan meliputi waktu. Data semacam ini memiliki keunggulan terutama karena bersifat rabust (kuat) terhadap beberapa tipe pelanggaran yakni heteroskadastisitas dan normalitas. Regresi data panel dapat dilakukan dengan tiga model yakni common effect model, fixed effect model dan random effect. Setiap model memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Pemilihan model tergantung pada asumsi yang dipakai peneliti dan pemenuhan syarat-syarat pengolahan data statistic yang benar sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara statistic.

Tabel 5.7 Common Effect Model

Variabel	coefficient	Std.Error	t-statistic	Prob
INFLASI	-0.5312	0.0566	-1.5279	0.1455
FDR	-0.0523	1.7403	-1.2964	0.0243
CAR	0.1982	0.5598	0.3111	0.0052
SBIS	-1.5252	0.1496	-3.4569	0.4406

Sumber: Data olahan, 2020

Tabel 5.8 Fix Effect Model

Variabel	Coefficient	Std.Error	t-statistic	Prob
INFLASI	-2.5312	1.6566	-1.5279	0.1355
FDR	-0.0523	0.4003	-1.2964	0.2033
CAR	0.1982	0.0598	3.3111	0.0522
SBIS	-0.5252	1.1496	-0.4569	0.6506

Sumber: Data olahan, 2020

Tabel 5.9 Random Effect Model

Variabel	coefficient	Std.Error	t-statistic	Prob
INFLASI	-0.5312	0.0466	-1.5379	0.1355
FDR	-0.0523	1.7303	-1.3064	0.0233
CAR	0.1982	0.5498	0.3211	0.0042
SBIS	-1.5252	0.1396	-3.4669	0.4306

Sumber: Data olahan, 2020

Setelah hasil dari model common effect, fix effect dan random effect diperoleh maka selanjutnya dilakukan uji chow. Pengujian tersebut dibutuhkan untuk menentukan model yang paling tepat diantara model common effect dan fixed effect.

5.1.7 Hasil Uji Chow

Uji chow digunakan untuk menentukan model yang paling tepat diantara fixed effect dan common effect.

Tabel 5.10 Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob
F	1.6146	(9,26)	0,163
Chi-square	10.759	9	0,338

Sumber: Data olahan, 2020

Dari hasil uji chow menunjukkan bahwa nilai probabilitas cross section adalah 0,338 atau $> 0,05$. Oleh karena itu model yang dipilih adalah common effect. Selanjutnya kita akan melakukan regresi model random effect, untuk menentukan model mana yang tepat.

5.1.8 Hasil Uji Hausman

Uji hausman digunakan untuk menentukan model yang paling tepat digunakan diantara fixed effect dan random effect.

Tabel 5.11 Uji Hausman

Test Summary	Chi-sq Statistic	d.f	Prob
Cross section Random	6.6309	4	1.000

Sumber: Output eviews 10, 2020

Chi square tabel untuk degree of freedom 4 sebesar 1.000. sedangkan chi square statistiknya sebesar 6.6309. selain menggunakan

model statistic hasil uji hausman juga dapat dilihat melalui probabilitas chi square $1.0000 > 0.05$. jadi random effect model lebih tepat untuk digunakan.

5.2 Hasil Pengujian Asumsi Klasik

Sebaiknya dilakukan pengujian regresi linier berganda dahulu sebelum dilakukan uji asumsi klasik dengan menggunakan model effect yang telah dipilih yakni Random effect model. Data yang baik harus diketahui data normal bebas dari multikolinearitas tidak homogeny memiliki autokorelasi tinggi. Berikut tiap-tiap pengujiannya:

5.2.1 Uji Normalitas Data

Menurut Imam Ghozali (2018) uji normalitas guna menguji model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal seperti diketahui bahwa uji t dan f mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Uji normalitas data juga dapat dilakukan dengan cara yaitu menggunakan grafik histogram

Tabel 5.12
Uji Normalitas

	Unstandardized Residual
N	40
Normal Mean	.0000
Parameters ^{a,b} Std. Deviation	2.03065318
Most Absolute	.145
Extreme Positive	.145
Differences Negative	-.106
Jarque-Bera Probability	.918 .368

Sumber: Data olahan, 2020

Berdasarkan tabel 5.12 menunjukkan nilai jb adalah 0.918 dengan signifikansi 0.368 artinya diatas nilai signifikan dari 0.05 ($0.368 > 0.05$) ini disimpulkan hipotesis alternative diterima dengan interpretasi data residual berdistribusi normal dan data pada penelitian ini telah memenuhi asumsi normalitas. Selanjutnya akan dilakukan pengujian multikolinearitas.

5.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikoiniearitas menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen. Imam Ghozali (2018). Model regresi baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen.

Tabel 5.13
Hasil Uji Multikolinearitas

	X_1	X_2	X_3	X_4
INFLASI	1.0000000	-0.273382	-0.064601	-0.407104
FDR	-2.273382	1.000000	0.122930	-0.003743
CAR	-0.064601	0.122930	1.000000	-0.016347
SBIS	-0.407104	-0.003743	-0.016347	1.000000

Sumber: Data olahan, 2020

Berdasarkan pengujian terhadap nilai koefisien korelasi diatas, masing-masing variabel mempunyai nilai koefisien < 0.9 maka dapat disimpulkan bahwa model tidak mengalami masalah multikolinearitas.

5.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas guna menguji regresi terjadi ketidaksamaan varian residual suatu pengamatan ke pengamatan lain (Ghozali, 2011).

Tabel 5.14
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Prob
INFLASI	0.2409
FDR	0.1254
CAR	0.0764
SBIS	0.9455

Sumber: Data olahan, 2020

Probabilitas pada masing-masing variabel independen tidak ada yang lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa uji ini tidak ada masalah heteroskedastisitas.

5.2.4 Uji Autokorelasi

Menurut Imam Ghozali (2018) uji autokorelasi guna menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan- kesalahan yang muncul pada data runtun waktu (time series). Uji autokorelasi untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu periode t dengan periode sebelumnya.

Beberapa uji stastistik sering dipergunakan adalah uji Durbin-Waston. Hasil perhitungan Durbin-Waston (d) dibandingkan dengan nilai dtabel pada $\alpha = 0,05$. Tabel d memiliki dua nilai, yaitu nilai batas atas (d_U) dan nilai batas bawah (d_L) untuk berbagai nilai n dan k .

Jika $0 < d \leq d_L$: tidak ada autokorelasi positif.

$d_L \leq d \leq d_U$: tidak ada autokorelasi.

$d_U < d < (4-d_U)$: tidak terjadi autokorelasi.

$4-d_L < d < 4$: tidak ada korelasi negative.

$4-d_U \leq d \leq 4-d_L$: tidak ada korelasi negative.

$d_U < d < 4-d_U$: tidak ada autokorelasi positif atau negative.

Tabel 5.15

Hasil Uji Autokorelasi Durbin-Watson

R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
.257	.172	.0303	1.6035

Sumber: Data diolah, 2020

Berdasarkan tabel 5.9 sebelum menginterpretasikan hasil uji autokorelasi dahulu ditentukan nilai dL dan dU pada tabel Durbin-Watson dengan cara melihat dari jumlah sampel (n) dan jumlah variabel (k), maka nilai dL nya adalah 1,2848 dan dU 1,7209. Kemudian diperoleh nilai DW sebesar 1.6035. Dapat disimpulkan bahwa $d_l < d < (4-d_u)$ $1,2848 < 1,553$ $(4-1,7209) = 2,2791$, dengan demikian dalam model regresi penelitian ini tidak terjadi autokorelasi.

5.3 Pengujian Hipotesis dengan Analisis Regresi Data Panel

5.3.1. Uji t

Untuk melihat besarnya pengaruh variabel fundamental perusahaan secara parsial terhadap pembiayaan bermasalah digunakan uji t. pengujian parsial atau uji t ini digunakan untuk menguji pengaruh setiap variable independen terhadap variabel dependennya.

Apabila nilai probabilitasnya f lebih kecil dari 0,05 maka hasilnya signifikan berarti terdapat pengaruh dari variabel independen secara individual

terhadap variabel dependen uji hipotesis secara parsial menggunakan uji t dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.16

Uji T

Variabel	t-Statistic	Prob.
C	-2.5252	0.0227
INFLASI	-1.5379	0.1355
FDR	-1.3064	0.0233
CAR	0.3211	0.0042
SBIS	-3.4669	0.4306

Sumber: Data olahan, 2020

1. Pengaruh INFLASI Terhadap NPF

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai t_{hitung} sebesar -1. 5379 dengan tingkat signifikan 0.1355 karena tingkat signifikan lebih besar dari 0.05 dan nilai t hitung $-1.5379 < t_{tabel} \ 1,685$ maka H_0 ditolak H_1 diterima artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara inflasi dengan variabel dependen atau NPF. Artinya inflasi tidak berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah, dimana semakin tinggi tingkat inflasi maka tingkat pembiayaan bermasalah dalam suatu bank akan tetap stabil. Hal ini mengindikasikan bahwa debitur merasa memiliki tanggung jawab atau komitmen untuk memenuhi kewajibannya dalam hal melunasi

pinjamannya ke bank, sehingga meskipun inflasi mengalami kenaikan pembiayaan bermasalah pada bank syariah tidak ikut mengalami kenaikan juga.

2. Pengaruh FDR Terhadap NPF

Berdasarkan hasil pengujian diatas nilai t hitung -1.3064 dengan tingkat signifikan $0.0233 > 0,05$ atau t hitung $-1.3064 < 1,685$ pada t tabel maka FDR berpengaruh tidak signifikan terhadap NPF. Artinya FDR berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah, dimana ketika variabel FDR mengalami peningkatan maka NPF juga mengalami penurunan. Likuiditas yang baik bagi suatu bank menandakan bahwa bank tersebut memiliki sumber dana yang cukup tersedia untuk memenuhi semua kewajiban. Sehingga semakin tinggi likuiditas dari suatu bank maka akan mengurangi resiko terjadinya permasalahan.

3. Pengaruh CAR terhadap NPF

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai t hitung 0.3211 dengan tingkat sig $0.0042 < 0,05$ atau t hitung $0.3211 < 1,685$ pada t tabel maka dapat disimpulkan bahwa CAR memiliki pengaruh terhadap NPF. Artinya semakin besar modal yang dimiliki suatu bank maka akan semakin kecil peluang terjadinya NPF. Hal ini sesuai dengan teori yang menyebutkan semakin tinggi rasio kecukupan modal maka akan dapat berfungsi untuk menampung risiko kerugian yang dihadapi oleh bank karena peningkatan permasalahan. Jadi kecukupan modal

merupakan faktor yang sangat penting bank bank dalam rangka menampung risiko kerugian terutama risiko kerugian atas tidak dibayarkannya.

4. Pengaruh SBIS terhadap NPF

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan t hitung yakni -3.4669 dengan signifikan $0.4306 > 0,05$ atau t hitung $-3.4669 < 1,685$ artinya SBIS tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap NPF. Artinya variabel SBIS tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan bermasalah dimana apabila tingginya nilai suku bunga yang diterapkan oleh bank Indonesia meskipun akan menaikkan suku bunga bank konvensional, namun demikian tidak akan berpengaruh banyak terhadap bank syariah.

5.3.2 Uji F

Uji statistic F dalam pengambilan keputusan menggunakan kriteria nilai signifikan value F test $< 0,05$ maka dapat disimpulkan model dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen. Dapat dikatakan pula bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.

Tabel 5.17

Uji F

F-Statistic	3.0282
Prob(F-statistic)	0.0303

Sumber: Data olahan, 2020

Regresi diatas dapat dilihat jika uji F dengan nilai signifikan tabel sebesar 0,0303. Hal ini berarti nilai $\text{sig} < 0,05$. Dan jika dihitung dengan $f_{\text{tabel}} = 2,85$ yakni $3,0282 > 2,85$ maka hipotesis teruji, artinya variabel inflasi, fdr, car dan sbis berpengaruh signifikan secara simultan terhadap pembiayaan bermasalah.

5.3.3 Koefisien Determinasi (Adjusted R-Square)

Pada intinya untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerapkan variasi variabel dependennya. Nilai adjusted R square yang mendekati satu berarti kemampuan variabel-variabel independennya memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi dependen.

Tabel 5.18

Koefisien Determinasi

<i>Cross-section fixed (dummy variables)</i>	
<i>R-squared</i>	0.2571
<i>Adjusted R-squared</i>	0.1722

Sumber: Data olahan, 2020

Berdasarkan tabel 5.12 diatas hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat bahwa angka R Square sebesar 0.172. Hal ini berarti hubungan antar variabel independen dengan variabel dependen adalah sebesar 17.22%.

5.4 Pembahasan

5.4.1 Pengaruh INFLASI Terhadap NPF

Berdasarkan hasil pengujian, inflasi tidak berpengaruh terhadap Non Performing Financing (NPF). Dimana semakin tinggi tingkat nilai inflasi didapat pula tingkat pembiayaan bermasalah didalam suatu bank dan tetap stabil. Dari sinilah dapat diketahui bahwa debitur merasa memiliki tanggung jawab komitmen dapat memenuhi kewajibannya didalam hal melunasi pinjaman kebank. Sehingga meskipun situasi inflasi sedang mengalami kenaikan maka pembiayaan bermasalah pada bank syariah tidak ikut mengalami kenaikan. Inflasi yang terjadi dalam jangka waktu pendek tidak dapat menyurutkan hasrat atau keinginan masyarakat guna mengikuti pemenuhan kebutuhannya. Maka dari itu dampak risiko kredit dalam jangka pendek masih dapat terkendalikan. Bank syariah yang lebih tahan terhadap guncangan yakni variabel makro ekonomi telah terbukti pada saat resesi maupun krisis yang terjadi, bank syariah mampu bertahan dibandingkan bank konvensional. Terbukti dengan pertumbuhan pembiayaan yang tetap pada tahun-tahun resesi 2008 atau 2009. Menurut Silvia Eka Febrianti (2015).

5.4.2 Pengaruh Finance to Deposit Ratio (FDR) Terhadap NPF

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Finance to Deposit Ratio (FDR) memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap NPF, hal ini terlihat dari nilai t hitung yang lebih kecil dari pada t tabel, dan hal ini

menunjukkan adanya pengaruh tetapi secara signifikan tidak memiliki pengaruh yang cukup kuat. Dimana apabila FDR mengalami peningkatan maka NPF cenderung juga mengalami penurunan. Dimana tingkat likuiditas dari suatu bank akan mengurangi pembiayaan bermasalah. Rasio ini juga menggambarkan kemampuan bank dalam membayarkan kredit kembali dan penarikan yang akan dilakukan oleh nasabah dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai likuiditasnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa pada saat jumlah pembiayaan yang diberikan dan FDR tinggi maka kemungkinan laba yang diperoleh bank pun akan tinggi. Dan disini lain jika semakin banyak jumlah pembiayaan yang diberikan maka akan menimbulkan resiko yang tinggi terhadap penyaluran pembiayaan tersebut. Didalam penelitian Mares Ana Suci Popita (2013) menunjukkan bahwa FDR berpengaruh tidak signifikan terhadap NPF.

5.4.3 Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) Terhadap NPF

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan Capital Adequacy Ratio (CAR) memiliki pengaruh terhadap NPF dimana artinya, jika semakin besar modal yang dimiliki oleh suatu bank maka akan semakin kecil peluang akan terjadinya Non Performing Financing (NPF). Dimana semakin tinggi rasio kecukupan modal maka akan dapat berfungsi guna menampung risiko kerugian yang dihadapi oleh bank, karena peningkatan pembiayaan bermasalah (NPF). Menurut Siti Raysa (2014). Jadi dapat dikatakan kecukupan modal ialah faktor yang sangat penting bagi bank dalam rangka guna menampung risiko kerugian terutama risiko kerugian

atas tidak dibayarkannya. Menurut Yuni Nugraini (2014) yang mengatakan bahwa CAR berpengaruh negative terhadap NPF.

5.4.4 Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) Terhadap NPF

Berdasarkan hasil penelitian SBIS yang merupakan variabel makro tidak berpengaruh terhadap Non Performing Finance (NPF). Dalam konteks SBIS, bank Indonesia sebagai pemberi pekerjaan akan memberikan imbalan kepada pembeli (bank umum syariah dan unit syariah) atas penerbitan surat berharga dan imbalan tersebut akan dibayarkan ketika SBIS telah jatuh tempo. Menurut Padmantlyo (2011). Dan hal ini tidak berpengaruh terhadap NPF, dimana ada atau tidaknya SBIS dan dikeluarkan atau tidak diterbitkannya SBIS maka tidak berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah. Seperti yang diketahui bahwa SBIS ini bertujuan guna meningkatkan efektifitas pelaksanaan pengendalian moneter yang didasarkan pada prinsip syariah melalui operasi terbuka, dengan adanya SBIS syariah diharapkan bank-bank syariah bisa mendapatkan return penempatan dana yang sama seperti yang didapatkan bank konvensional. Karena hal ini bersifat makro dan merupakan faktor eksternal, tidak memiliki pengaruh yang kuat terhadap NPF.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan uji simultan bahwa variabel INFLASI, Financing Deposit Ratio, Capital Adequacy Ratio, Sertifikat Bank Indonesia berpengaruh signifikan terhadap Non Performing Financing pada Sektor Perbankan Syariah di Indonesia periode 2015-2018.
2. Berdasarkan uji parsial variabel INFLASI, FDR, CAR dan SBIS tidak berpengaruh terhadap Non Performing Financing. Hal ini terjadi karena inflasi tidak mempengaruhi terhadap NPF atau pembiayaan bermasalah.

6.2 Saran

Adapun saran yang ingin diberikan berdasarkan penelitian sebagai berikut:

1. Hasil penelitian diharapkan memberikan masukan atau gambaran bagi bank umum syariah sendiri dalam menyalurkan pembiayaan dengan melihat faktor-faktor yang dapat menghambat proses penyaluran kepada masyarakat dan mengurangi risiko yang nantinya dapat terjadi.

2. Bagi nasabah sendiri, agar dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pembiayaan bermasalah atau kredit bermasalah. Agar nasabah dapat memperhatikan hal-hal yang mengandung risiko didalam pembiayaan.
3. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya menambahkan variabel-variabel lainnya, karena kemungkinan variabel-variabel lain tidak dimasukkan kedalam penelitian ini berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah atau NPF.



DAFTAR PUSTAKA

- Agustin Hamdi, *Manajemen Keuangan* 2016, Universitas Islam Riau.
- Ana, Popita mares Suci, 2013. *Analisis Penyebab Terjadinya Non Performing Financing pada Bank Umum Syariah di Indonesia*. Fakultas Ekonomi UNS Indonesia.
- Anwar 2002. *Praktek perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafndo Persada.
- Hasibuan. 2006. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Aksara.
- Jahja, Adi Susilo dan Muhammad Iqbal, 2012. *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional*. Vol 7. No 2. Institute Perbanas Jakarta.
- Mewengkang, Yves Regina. 2013. *Analisis NPF dan NPL Bank Pemerintah Dan Bank Umum Swasta Nasional Yang Tercatat Di BEI*. Vol 1. No 4. Jurnal EMBA.
- Purnamasari, Gusti Ayu Yulianti dan Dodik Ariyanto, 2016. *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Konvensional Dan Bank Syariah Periode 2010-2014*. Vol 15. No 1. Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.
- P3EI. *Ekonomi islam, Pusat Pengkajian Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*.
- Raysa, Siti 2014. *Analisis Penyebab terjadinya NPF Bank Berdasarkan Rasio Keuangan Bank*. Vol 37. No 1.
- Sovia, Sasa Elida. 2016. *Analisis Penyebab terjadinya NPF Bank Bank Syariah Berdasarkan Rasio Keuangan Bank*. Vol 37. No 1.
- Vivin, Yenni Annor dan Budi Wahono, 2016. *Analisis Faktor-faktor yang menyebabkan permasalahan NPF Di Bank umum syariah Indonesia*. *Jurnal . FE Unisman Prodi Manajemen*.

www.ojk.go.id

www.bankaceh.co.id

www.bankntbsyariah.co.id

www.bankmuamalat.co.id

www.bankvictoriasyariah.co.id

www.brisyariah.co.id

www.bnisyariah.co.id

www.syariahmandiri.co.id

www.megasyariah.co.id

www.paninbanksyariah.co.id

www.syariahbukopin.co.id



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau